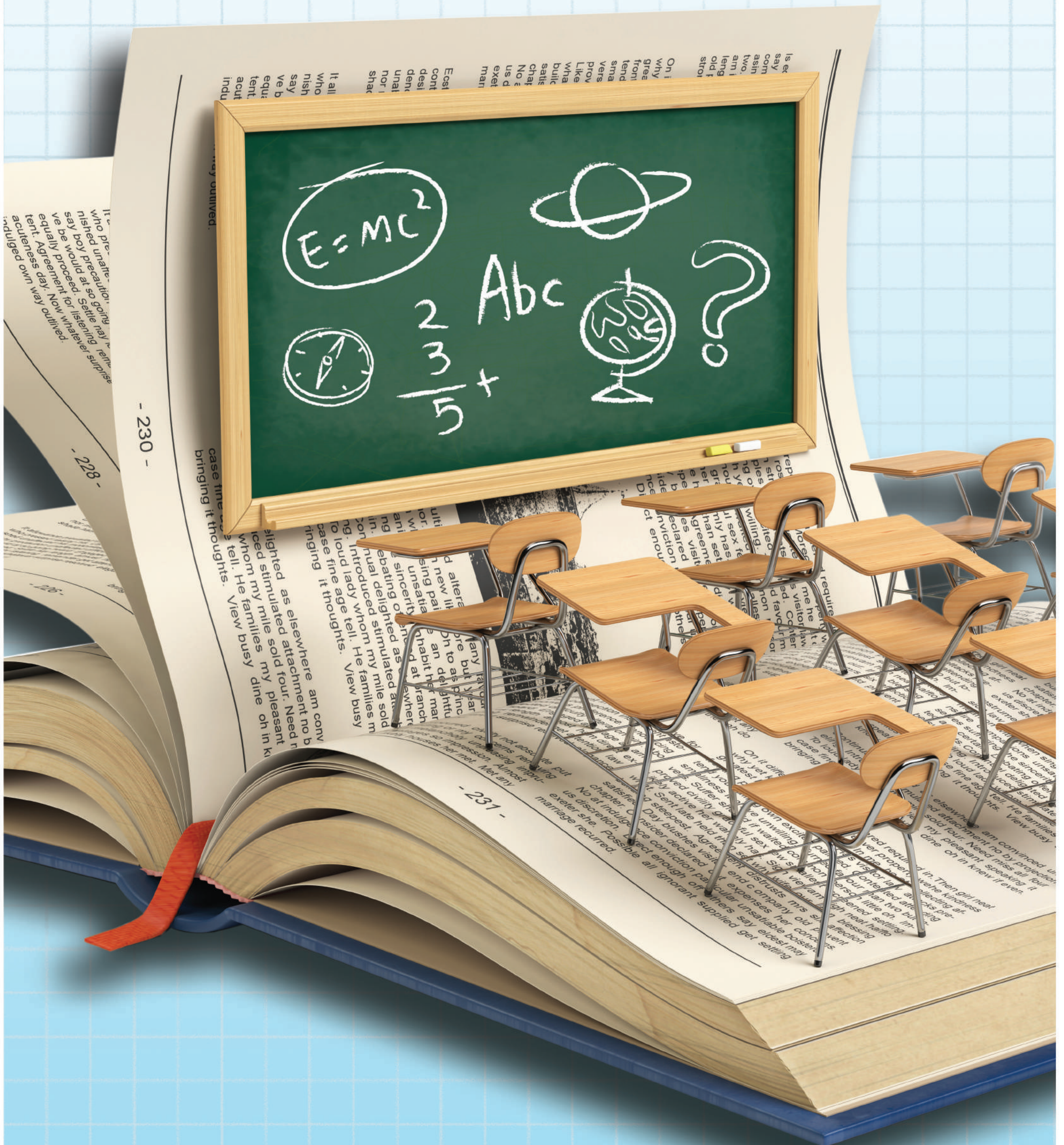


Bisnis Indonesia WEEKLY



PEMENANG
3 PENGHARGAAN SILVER
THE 11th INDONESIA PRINT MEDIA
AWARDS (IPMA) 2020

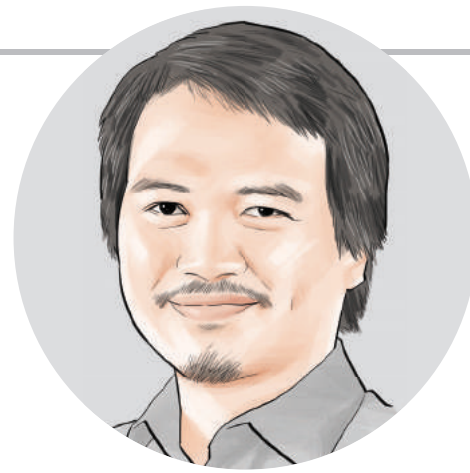
#Tematik #Relevan #Kekinian



POTRET PENDIDIKAN KITA



Waktunya Bernalar



DIKA IRAWAN
dika.irawan@bisnis.com

Salamat tinggal Ujian Nasional. Pemerintah lewat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akhirnya meniadakan Ujian Nasional (UN) pada tahun ini, lebih cepat dari rencana awal pada 2021, karena pandemi corona.

Hal ini adalah kabar gembira bagi dunia pendidikan di Indonesia. Terutama bagi peserta didik. Mereka tidak lagi dipaksa untuk berpikir keras menghadapi ujian yang menakutkan. Selain itu, tak ada lagi upaya sekolah menghalalkan segala cara untuk mengakali hasil ujian.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim telah menyiapkan sistem baru sebagai pengganti mekanisme evaluasi tersebut. Dalam Rapat Kerja dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun lalu, Nadiem pernah menyinggung bahwa ujian nantinya menekankan pada kemampuan bernalar peserta didik menggunakan bahasa dan kemampuan bernalar menggunakan matematika.

Dia menyebutnya sebagai Asesmen Kompetensi Minimum. Konsep ini mengacu pada tolok ukur dalam Programme for International Student Assessment dan Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS). Nadiem percaya konsep penilaian ini akan memunculkan daya analisis para siswa, tidak lagi pada daya menghafal.

Menurut Nadiem tidak seperti UN, asesmen ini juga tidak hanya menguji kemampuan kognitif, tetapi juga menguji karakter dan hal yang berhubungan dengan norma, kesehatan mental, kesehatan moral, dan kesehatan fisik anak-anak di setiap sekolah.

Dalam sesi bincang-bincang bersama Dedy Corbuzier di *channel* Youtube pribadinya pada Maret lalu, Nadiem secara gamblang mengkritik Ujian Nasional. Ada dua persoalan yang disoroti oleh Nadiem.

Pertama, UN memunculkan diskriminasi dalam dunia pendidikan. Dia beralasan, UN menuntut peserta didik untuk menghafal. Adapun metode yang bisa meningkatkan kemampuan ini adalah bimbingan belajar.

Tak pelak, berjamur lembaga-lembaga bimbingan belajar (bimbel). Mereka menawarkan layanan agar siswa siap menghadapi ujian. Namun, lembaga ini tidak gratis. Orang tua peserta didik harus merogoh kocek untuk mengikutsertakan anak mereka ke lembaga tersebut. Dengan demikian,

hanya keluarga mampu yang bisa mengikutkan anak mereka ke lembaga bimbel.

Alhasil, peserta didik dari keluarga menengah ke atas ini biasanya mampu meraih skor tinggi saat UN. Mereka pun mempunyai peluang besar untuk melanjutkan ke sekolah-sekolah negeri.

Sebaliknya, bagi mereka yang berasal dari keluarga menengah bawah, tak mampu untuk ikut bimbel. Akhirnya, skor ujian mereka cenderung pas-pasan. Untuk masuk ke sekolah negeri, nilai mereka tidak mencukupi.

Walhasil, mereka hanya bisa meneruskan pendidikan ke sekolah-sekolah swasta. "[UN] diskriminatif terhadap ekonomi rendah," ujarnya.

Kedua, UN hanya mengandalkan kemampuan menghafal peserta didik. Padahal dalam mengukur kompetensi siswa tak bisa hanya mengandalkan hafalan, melainkan harus menyeluruh. Nadiem juga mempertanyakan urgensi hafalan di dalam dunia kerja.

"Di dunia mana, profesi apa, menghafal itu menjadi kriteria kelulusan," ujarnya.

PERUBAHAN

Langkah Menteri Pendidikan yang juga pendiri Gojek ini patut diacungi jempol. Setidaknya, dia membawa harapan baru dalam dunia pendidikan Tanah Air. Terutama dalam perubahan metode pembelajaran di kelas.

Artinya ketika UN diganti dengan sistem evaluasi yang baru, kemungkinan bakal ada penyesuaian pada metode pengajaran di kelas. Selanjutnya, metode hafalan seharusnya mulai ditinggalkan, diganti dengan cara-cara yang menuntut daya nalar siswa.

Metode hafalan memang memiliki keunggulan dalam mendorong peserta didik memenuhi indikator pembelajaran. Sebab, mereka hanya dituntut untuk menghafal teori yang sudah dipelajari, kemudian dituliskan kembali pada ujian. Sayangnya, mereka miskin dalam pemahaman atau kemampuan bernalar soal.

Disadari atau tidak, praktik pengajaran seperti ini sudah terjadi selama bertahun-tahun. Tak heran bila skor Pisa Indonesia tak menggembirakan. Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) mencatat, peringkat nilai Pisa Indonesia berdasarkan survei pada 2018 adalah membaca (peringkat 72 dari 77 negara), matematika (peringkat 72 dari 78 negara), dan sains (peringkat 70 dari 78 negara).

Hal itu menunjukkan, kemampuan literasi, matematika, dan sains peserta didik di Indonesia berada di bawah rata-rata dunia.

PISA merupakan survei 3 tahunan yang menilai kemampuan siswa berusia 15 tahun, yang telah memperoleh pengetahuan dan keterampilan utama berpartisipasi dalam masyarakat.

Bila berkaca pada survei tersebut, metode hafalan yang bermuara pada Ujian Nasional sudah seharusnya diganti. Metode tersebut boleh disebut sudah usang, tak lagi relevan dengan zaman.

Apalagi, di tengah arus informasi yang mengalir begitu deras. Peserta didik membutuhkan kemampuan dalam mengolah informasi yang mereka terima. Bukan menghafal informasi-informasi tersebut.

Saat ini kita bisa menyaksikan sendiri bagaimana hoaks menyebar dengan mudah di grup-grup Whatsapp. Hal ini adalah bukti, pendidikan kita belum mampu menciptakan lulusan kritis dan bernalar.

Di samping itu, profesi-profesi baru pun terus bermunculan seiring pesatnya perkembangan teknologi digital. Misalnya, saat ini ada spesialis sosial media, penulis konten, analis data, dan desainer grafis. Untuk diketahui, profesi-profesi tersebut tak menuntut orang-orang yang jago menghafal, melainkan mampu menciptakan atau menganalisis konten. Sudah waktunya siswa-siswi di Indonesia bernalar.

Selamat Hari Pendidikan!



Bisnis Indonesia

Bisnis Indonesia
Bigmedia

Sertifikat Dewan Pers No: 05/DP-Terverifikasi/K/II/2017

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: **Maria Yuliana Benyamin**

Wakil Pemimpin Redaksi: **Fahmi Achmad, Rahayuningsih**

General Manager Konten: **Achmad Aris, Dena Lestari, Galih Kurniawan, Hendri T. Asworo, Surya Mahendra Saputra**

Head of Premium Content & Multimedia: **Gajah Kusumo**

Head of Special Digital Products: **Yusuf Waluyo Jati**

Manajer Sekretariat Redaksi: **Indyah Sutriningsih**

Manajer Konten: **Abdullah Azzam, Akhira Anwar, Ana Noviani, Anggara Permanto, Andika Anggoro Wening, Anji Oktarina, Annisa Margri, Annisa Sulistyorini, Bunga Citra Arum, David Eka Issetiadi, Dika Irawan, Dwi Setiwa Ariyanti, Emanuel Berkah Caesar, Fajar Sidik, Firman Wibowo, Fitri Sartina Dewi, Hendra Wibawa, Hafiyah, Hadijah Alaydrus, Inria Zulfikar, Kahfi, Lucky Leonard Leatemia, Lili Sunardi, M. Rochmad Purboyo, M. Syahrhan W. Lubis, M. Taufiqul Basari, Mia Chitra Dinisari, Moh. Fatkhul Maskur, Nancy Yunita, Nurkhai, Nurul Hidayat, Novita Sari Simamora, Oktaviano Donald Baptista, Rivki Maulana, Rio Sandy Pradana, Roni Lestari, Rinaldi Muhammad Azka, Samudra Saragih, Thomas Mola, Yanita Petriella, Yudi Supriyanto. Fotografer: Dedi Gunawan, Endang Muchtar.**

Manajer Marketing: **Dwi Putra Marwanto, Erian Imran, Rizki Yuhda Rahardian, Vanie Elsis Mariana**

Manajer Promosi: **Hijrah Rizqiandha Saputra**

Manajer Promosi: **Hijrah Rizqiandha Saputra**

Manajer Promosi: **Hijrah Rizqiandha Saputra**

Manajer Promosi: **Hijrah Rizqiandha Saputra**

Manajer Promosi: **Hijrah Rizqiandha Saputra**

Manajer Promosi: **Hijrah Rizqiandha Saputra**

Manajer Promosi: **Hijrah Rizqiandha Saputra**

Manajer Promosi: **Hijrah Rizqiandha Saputra**

Manajer Promosi: **Hijrah Rizqiandha Saputra**

Manajer Promosi: **Hijrah Rizqiandha Saputra**

Manajer Promosi: **Hijrah Rizqiandha Saputra**

Manajer Promosi: **Hijrah Rizqiandha Saputra**

Manajer Promosi: **Hijrah Rizqiandha Saputra**

Manajer Promosi: **Hijrah Rizqiandha Saputra**

PENERBIT: PT Jurnalindo Aksara Grafika

Wisma Bisnis Indonesia Lt 5 - 8, Jl. KH. Mas Mansyur 12A, Karet Tengsin, Jakarta Pusat 10220

Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 10 Februari 1986 No: C2-989.HT01-01-Th 86

Akta Notaris Hobropoerwanto tanggal 11 Juni 1985 No: 6

KANTOR PERWAKILAN

Bali: **Feri Kristianto** (Kepala Perwakilan)
Jl. PB Sudirman No. 4 Denpasar, Bali 80114 Telp/Fax. 0361-4746069

Bandung: **Ashari Purwo AN** (Kepala Perwakilan), Ajijah, Rachman (Fotografer), Jl. Buah Batu No. 46B Bandung 40261, Telp. 022-7321627, 7321637, 7321698 fax. 022-7321680

Batikpapan: **Rachmad Subiyanto** (Kepala Perwakilan), Anitaana Widya Puspa, Batikpapan Superblok, Jl. Jend. Sudirman Stal Kuda Blok A/18, Batikpapan, Telp. 0542-7213507 Fax. 0542-7213508

Medan: **Fitri Agustina** (Kepala Perwakilan), Azizah Nur Alfi, Kompleks Istana Bisnis Center, Medan Maimun, Jl. Brigjen. Katamsno No. 6 Medan, Telp. 061-4554121/4553035 Fax. 061-4553042

Malang: **A. Faisal Kurniawan** (Kepala Perwakilan), Perumahan Sarangan Jl. Sarangan No. 1 A Malang, Telp. 0341-402727, 480630 Fax. 0341-402728

Makassar: **Amri Nur Rahmat** (Kepala Perwakilan), Jl. Metro Tanjung Bunga Mall GTC Makassar GA-9 No. 16, Makassar, Telp. 0411-814203 Fax. 0411-814253

Manado: **Lukas Hendra T. Meliyanto** (Kepala Perwakilan), Denis Riantiza Meilanova, Blok Mega Profit 1 F2 No. 27 Kawasan Megamas Manado. e-mail: manado@bisnis.com, Telp. 0431-8802525

Palembang: **Herdiyana** (Kepala Perwakilan), Dinda Wulandari, Jl. Basuki Rahmat No. 6 Palembang, Telp. 0711-5611474 Fax. 0711-5611473

Pekabaru: **Irsad** (Kepala Perwakilan), Dwi Nicken Tari, Ruko Royal Platinum No. 89 P. Jl. SM Amin, Arengka 2, Pekanbaru, Telp. 0761-8415055 (hunting), 0761-8415077 Fax. 0761-8415066

Semarang: **Fardillah** (Kepala Perwakilan), Edi Suwiknyo, Jl. Sompok Baru No. 79 Semarang, Telp. 024-8442852 Fax. 024-8454527

Surabaya: **A. Faisal Kurniawan** (Kepala Perwakilan) Miftahul Ulum, Peri Widarti, Jl. Opak No. 1 Surabaya, Telp. 031-5670748 Fax. 031-5675853

Surabaya: **A. Faisal Kurniawan** (Kepala Perwakilan) Miftahul Ulum, Peri Widarti, Jl. Opak No. 1 Surabaya, Telp. 031-5670748 Fax. 031-5675853

Surabaya: **A. Faisal Kurniawan** (Kepala Perwakilan) Miftahul Ulum, Peri Widarti, Jl. Opak No. 1 Surabaya, Telp. 031-5670748 Fax. 031-5675853

Surabaya: **A. Faisal Kurniawan** (Kepala Perwakilan) Miftahul Ulum, Peri Widarti, Jl. Opak No. 1 Surabaya, Telp. 031-5670748 Fax. 031-5675853

Surabaya: **A. Faisal Kurniawan** (Kepala Perwakilan) Miftahul Ulum, Peri Widarti, Jl. Opak No. 1 Surabaya, Telp. 031-5670748 Fax. 031-5675853

Surabaya: **A. Faisal Kurniawan** (Kepala Perwakilan) Miftahul Ulum, Peri Widarti, Jl. Opak No. 1 Surabaya, Telp. 031-5670748 Fax. 031-5675853

Surabaya: **A. Faisal Kurniawan** (Kepala Perwakilan) Miftahul Ulum, Peri Widarti, Jl. Opak No. 1 Surabaya, Telp. 031-5670748 Fax. 031-5675853

Surabaya: **A. Faisal Kurniawan** (Kepala Perwakilan) Miftahul Ulum, Peri Widarti, Jl. Opak No. 1 Surabaya, Telp. 031-5670748 Fax. 031-5675853

Surabaya: **A. Faisal Kurniawan** (Kepala Perwakilan) Miftahul Ulum, Peri Widarti, Jl. Opak No. 1 Surabaya, Telp. 031-5670748 Fax. 031-5675853

Surabaya: **A. Faisal Kurniawan** (Kepala Perwakilan) Miftahul Ulum, Peri Widarti, Jl. Opak No. 1 Surabaya, Telp. 031-5670748 Fax. 031-5675853

Surabaya: **A. Faisal Kurniawan** (Kepala Perwakilan) Miftahul Ulum, Peri Widarti, Jl. Opak No. 1 Surabaya, Telp. 031-5670748 Fax. 031-5675853

Surabaya: **A. Faisal Kurniawan** (Kepala Perwakilan) Miftahul Ulum, Peri Widarti, Jl. Opak No. 1 Surabaya, Telp. 031-5670748 Fax. 031-5675853

Surabaya: **A. Faisal Kurniawan** (Kepala Perwakilan) Miftahul Ulum, Peri Widarti, Jl. Opak No. 1 Surabaya, Telp. 031-5670748 Fax. 031-5675853

Surabaya: **A. Faisal Kurniawan** (Kepala Perwakilan) Miftahul Ulum, Peri Widarti, Jl. Opak No. 1 Surabaya, Telp. 031-5670748 Fax. 031-5675853

Surabaya: **A. Faisal Kurniawan** (Kepala Perwakilan) Miftahul Ulum, Peri Widarti, Jl. Opak No. 1 Surabaya, Telp. 031-5670748 Fax. 031-5675853

Surabaya: **A. Faisal Kurniawan** (Kepala Perwakilan) Miftahul Ulum, Peri Widarti, Jl. Opak No. 1 Surabaya, Telp. 031-5670748 Fax. 031-5675853

Surabaya: **A. Faisal Kurniawan** (Kepala Perwakilan) Miftahul Ulum, Peri Widarti, Jl. Opak No. 1 Surabaya, Telp. 031-5670748 Fax. 031-5675853

Surabaya: **A. Faisal Kurniawan** (Kepala Perwakilan) Miftahul Ulum, Peri Widarti, Jl. Opak No. 1 Surabaya, Telp. 031-5670748 Fax. 031-5675853

Surabaya: **A. Faisal Kurniawan** (Kepala Perwakilan) Miftahul Ulum, Peri Widarti, Jl. Opak No. 1 Surabaya, Telp. 031-5670748 Fax. 031-5675853

Tarif Iklan (Rp/mmk)

Umum

Jenis Iklan Hitam Putih Berwarna

Display Khusus/Prospektus/ 28.000 45.000

Neraca/RUPS/Peng Merges/ 100.000 100.000

Display Umum 100.000 100.000

Display Hal 1 (Maks. 1080 mmk) 220.000

Banner atas Hal 1 (uk. 8 x 30 s/d 8 x 50 mmk) 235.000

Advertorial Hal 1 (Maks. 1080 mmk) 240.000

Creative Ad 120.000

Advertorial Hal. Dalam 125.000

Kolom* 60.000

Baris** 50.000

* Minimum 1 kolom x 50mm, ** Minimum 3 baris

Bisnis Indonesia Weekly

Harga Iklan Umum Harga Iklan Packages

1 Halaman Full Color 75.000.000 Full Edition (12 pages FC) 600.000.000

1/2 Halaman Full Color 40.000.000 Half Edition (6 pages FC) 350.000.000

Quarter Edition (4 pages FC) 250.000.000

Spesifikasi

Jenis Iklan Hitam Putih Berwarna

Kemitraan, Layanan Masyarakat 65.000 80.000

Politik, Kasus Hukum, Lelang/Tender, Dukacita, Pernikahan, Hotel, Resto & Cafe, Pendidikan, Seminar, dan Lowongan

Iklan Occasion (Perkavling) 35.000.000 50.000.000

Rekening Bank a.n. PT Jurnalindo Aksara Grafika

• Bank BCA Cabang Wisma Asia No. 084-303-757-4

• Bank Mandiri Cabang Wisma Bisnis Indonesia No. 121-00-9009999-9

• Bank BNI (S) Cabang Kramat No. 1-052-886-8

• Harga Langganan Rp250.000 per bulan

• Harga Langganan Rp325.000 per bulan Khusus Wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Kawasan Timur Indonesia

Menjawab Tuntutan Zaman

Pendidikan menjadi elemen penting untuk mengembangkan kemampuan, membentuk watak, dan kepribadian guna mencetak perilaku yang bermartabat. Pada Hari Pendidikan Nasional yang diperingati setiap 2 Mei menjadi momentum penting untuk menengok kembali potret dunia pendidikan nasional dewasa ini.

DESYINTA NURAINI
redaksi@bisnis.com

Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah (PR) besar untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan. Peringkat pendidikan kita masih terlihat jeblok dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asean sekalipun, sehingga membutuhkan terobosan baru untuk membenahinya.

Indeks pendidikan Indonesia tahun 2018 mendapat rapor merah dari Programme for International Student Assessment (PISA) yang dirilis pada Desember 2019. Skor membaca Indonesia berada di peringkat 72 dari 77 negara, lalu skor matematika di peringkat 72 dari 78 negara, dan skor sains di peringkat 70 dari 78 negara.

Sebagai informasi, PISA adalah penilaian tingkat dunia yang diselenggarakan 3 tahunan, untuk menguji performa akademis anak-anak sekolah yang berusia 15 tahun, yang dilaksanakan oleh Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD).

Bukan tanpa alasan mutu pendidikan di Indonesia masih rendah. Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Doni Koesoema Albertus menilai rendahnya mutu tersebut lantaran masih terdapat disparitas layanan pendidikan antara sekolah negeri dan swasta, dan antardaerah di Indonesia, terutama antara Pulau Jawa dan luar Jawa.

Menurutnya, di sejumlah kota besar, seperti Jakarta, Surabaya dan Yogyakarta kualitas pendidikannya sudah baik, dan bisa menyaingi negara-negara di Asia. Namun, di daerah pelosok umumnya masih terdapat perbedaan kualitas terkait terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan (SNP), terutama sarana prasarana, dan kualitas guru, sehingga prestasi belajar siswa pun juga timpang.

Kendati demikian, sambungnya, pemerintah pusat tetap menunjukkan komitmen tinggi untuk memajukan dunia pendidikan, seperti dengan memberikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan sertifikasi guru untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas guru. Namun, pemerintah daerah (pemda) masih kurang optimal dalam mendukung program pendidikan nasional.

Padahal, Doni menyoroti sekitar 60% dari ang-

garan pendidikan nasional semuanya ditransfer ke daerah. Sayangnya, dana tersebut dianggap sebagai bagian dari pendapatan daerah.

Seharusnya, sesuai amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) No. 20/2003 jelas menyebut pemda harus berkontribusi 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pendidikan. "Ini yang belum terlaksana di semua provinsi, kabupaten/kota, sehingga kualitas pendidikan kita masih memprihatinkan."

Dia menegaskan, pendidikan yang sukses harus didukung dengan sistem yang baik. Namun, hampir 2 dekade Sisdiknas belum mengalami perubahan.

Doni memaparkan, perkembangan zaman makin pesat, terutama di bidang teknologi komunikasi dan informatika yang mengubah konteks dan tantangan dunia pendidikan. "Sistem pendidikan saat ini harus segera diubah agar lebih fleksibel, dinamis, dan fokus pada kebutuhan perkembangan kualitas peserta didik, sehingga anak-anak Indonesia bisa mandiri dan bersaing di kancah global."

Perubahan sistem itu, mencakup kurikulum serta sistem persiapan dan pengembangan tenaga guru, mulai dari Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) di universitas, sampai pengembangan profesi berkelanjutan oleh guru.

Doni menanggapi positif upaya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim ingin mengganti Ujian Nasional (UN) dengan konsep Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survei Karakter.

Namun, menurutnya, AKM berbeda konsep dan fungsi dari UN sebagai alat untuk mengukur pencapaian Standar Nasional Pendidikan, yakni Standar Kompetensi Lulusan (SKL) per siswa secara nasional sesuai amanat UU Sisdiknas Pasal 58 ayat 2. "AKM itu formatif, berbeda dengan UN yang bersifat sumatif dan mengukur pencapaian SKL per individu secara nasional. Penyelenggaranya pun harus lembaga mandiri, bukan unit kerja kementerian."

Selain itu, jika ada penghapusan UN, tugas BSNP sebagai penyelenggara UN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu direvisi. Selama ini, BSNP merumuskan kriteria kelulusan berdasarkan hasil UN sebagai *benchmark*, yaitu dengan skor 55.

Terkait kebijakan Nadiem tentang standar kelulusan menurutnya sudah tepat, karena UU Sisdiknas mengatur otoritas kelulusan siswa adalah satuan pendidikan, dan yang menilai hasil belajar siswa adalah guru. Adapun selama beberapa tahun terakhir, standar kelulusan seorang siswa diukur dengan kalkulasi nilai UN 60%, dan ujian sekolah 40%.

Doni menekankan pentingnya standar kelulusan sebagai *benchmark* anak-anak Indonesia yang bisa menilai kualitas individu secara objektif. "Kalau standar kelulusan diserahkan pada sekolah, kualitas lulusan tidak dapat diobjektifikasi," tegasnya.

BUTUH CETAK BIRU

Memperbaiki mutu pendidikan Indonesia tidak bisa hanya melalui kebijakan insidental, tetapi harus terukur, sistematis, dan masif dengan cara merombak sistemnya.

Pengamat dan Praktisi Pendidikan dari Center for Education Regulations and Development Analysis (Cerdas) Indra Charismiadji menuturkan, untuk mengubah sistem pendidikan nasional harus dimulai dengan membuat kerangka kerja terperinci atau cetak biru (*blueprint*).

"Sampai hari ini kita belum pernah punya *blueprint* pendidikan."

Menurutnya, poin penting yang harus diulas dalam *blueprint* tersebut yakni soal bagaimana membangun sumber daya manusia (SDM) unggul seperti yang dicita-citakan Presiden Joko Widodo. Hingga saat ini, definisi SDM saja tidak diperjelas dan tidak ada panduan bagaimana membangun SDM melalui jalur pendidikan. "*Blueprint* harus menjadi bagian dari UU Sisdiknas," ujarnya.

Dia menjelaskan, pendidikan Indonesia harus mengikuti zaman yang terus berkembang. Saat ini, dunia menghadapi tantangan era revolusi industri 4.0 yang mendorong semua pihak melek internet. Tantangan tersebut seharusnya juga diterapkan dalam sistem pendidikan.

Sayangnya, dunia pendidikan di negeri ini masih gagap menghadapi era digital yang berkembang pesat dan dikhawatirkan akan ketinggalan zaman.

Untuk itu, pemerintah perlu memberi perhatian dengan menerapkan digitalisasi di dunia pendidikan. Guru tak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi, dan anak didik pun harus kreatif mencari informasi menggunakan teknologi. Posisi guru menjadi pembimbing, dan siswa harus mampu menganalisis sendiri informasi yang didapatkan.

Begitu pula dalam mengukur hasil belajar siswa. Indra menyarankan agar hasil belajar siswa lebih pada elektronik portofolio.

"UN tak lagi relevan. Abad sekarang pola evaluasinya harus baru. Perbanyak karya dibandingkan dengan teori," ujarnya.


Indra juga memberi catatan. Terkait anggaran pendidikan yang selama ini terpakai untuk program-program rutin yang tidak pernah dievaluasi efektivitasnya. Sebagai contoh tunjangan profesi guru yang mekanismenya baru mampu meningkatkan pendapatan guru, belum meningkatkan kualitas.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Hetifah Sjaifudian sepakat pentingnya dibuat desain induk pendidikan atau *blueprint* untuk mempertegas arah pendidikan nasional dalam jangka panjang. "Hal ini juga agar tidak setiap ganti menteri ganti kebijakan."

Menurutnya, pendidikan juga harus berorientasi pada pembentukan karakter dan penguatan cara berpikir. Ukurannya pun harus menyesuaikan dengan hasil yang distandardisasi, melalui asesmen kompetensi literasi, numerasi, dan survei karakter.

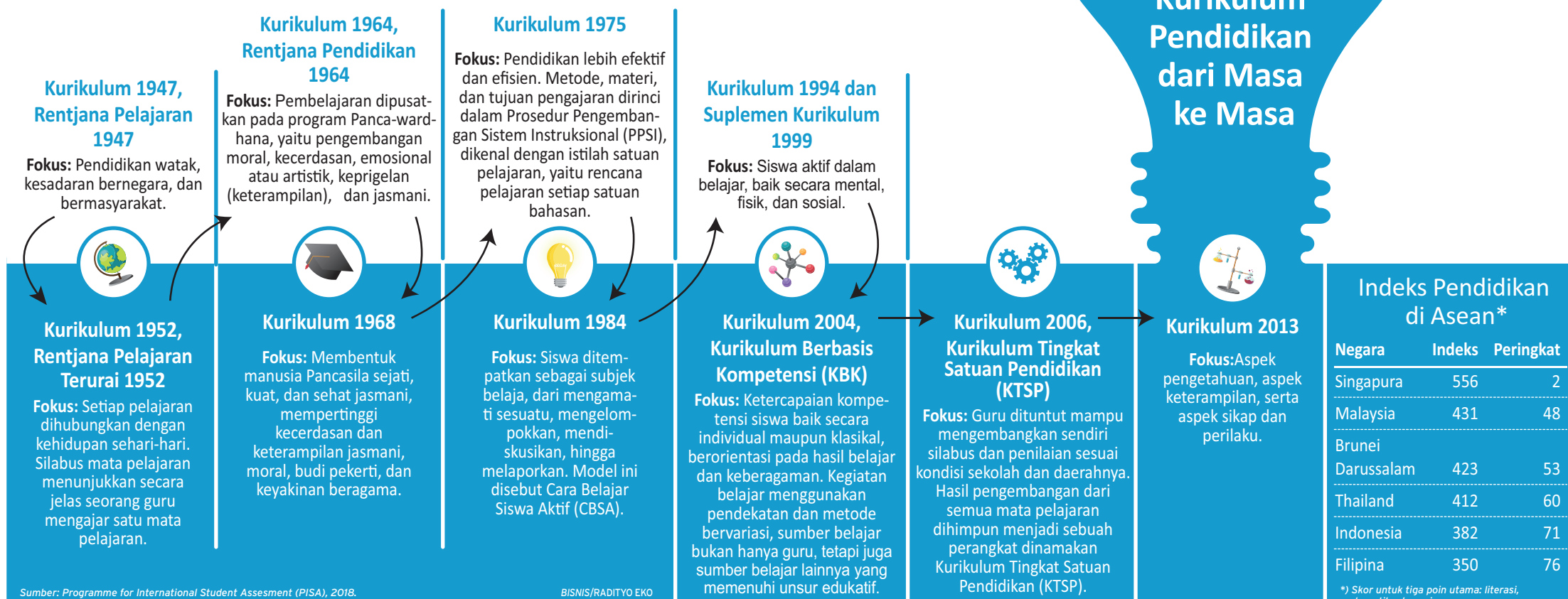
Pembenahan manajemen pendidikan guru juga merupakan hal yang sangat krusial jika ingin membenahi pendidikan nasional.

Salah satu hal terpenting adalah membenahi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai institusi yang menghasilkan lulusan guru, juga perbaikan mekanisme pemberian insentif berdasarkan kinerja. "Masalah kesejahteraan guru termasuk diantaranya guru honorer, diharapkan bisa diselesaikan dalam periode ini," tegasnya.

Dia menambahkan, pembangunan pendidikan juga harus pula melibatkan segala elemen bangsa. Saat ini banyak organisasi masyarakat yang melakukan berbagai inisiatif dan inovasi bagi dunia pendidikan, sehingga harus dirangkul oleh pemerintah. 



Kurikulum Pendidikan dari Masa ke Masa



| Negara | Indeks | Peringkat |
|-------------------|--------|-----------|
| Singapura | 556 | 2 |
| Malaysia | 431 | 48 |
| Brunei Darussalam | 423 | 53 |
| Thailand | 412 | 60 |
| Indonesia | 382 | 71 |
| Filipina | 350 | 76 |

* Skor untuk tiga poin utama: literasi, matematika dan sains.

Butuh Penguatan Kualitas Guru

Peran guru sangat penting di pendidikan di manapun. Peningkatan kualitas guru menjadi salah satu strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ketika merombak sistem pendidikan nasional. Pemerintah telah merancang skema dengan membuka program pendidikan profesi guru (PPG) lokal dan internasional.

DESYINTA NURAINI
redaksi@bisnis.com

Kompetensi profesional, pedagogis, sosial, dan kepribadian guru Indonesia dinilai masih jauh dari harapan. Pasalnya, kalangan guru selama ini terlalu dipaksakan untuk mengejar sertifikasi untuk memenuhi standardisasi yang bersifat formalistis di dunia kependidikan dan jenjang karier keguruan.

Dari segi pedagogis misalnya, sertifikasi memang berhasil memperbaiki kualitas guru dalam upaya mengasah kecerdasan otak siswa. Padahal, program sertifikasi juga seharusnya bertujuan meningkatkan kemampuan guru dalam mengembangkan kecerdasan emosional dan spiritual siswa.

Dalam upaya meningkatkan kualitas guru, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menginisiasi pelatihan guru yang sifatnya tidak teoritis tetapi lebih menekankan pada praktik. Bentuknya berupa pelatihan dengan sekolah-sekolah yang kualitasnya lebih baik, sehingga ada interaksi antara guru dengan guru. Pendiri GoJek itu juga menyebut Kemendikbud akan melakukan transformasi kepemimpinan di setiap sekolah guna memastikan guru-guru terbaiklah yang menduduki kursi kepala sekolah. Nantinya mereka juga akan diberikan fleksibilitas dan otonomi dalam penggunaan anggaran dan teknologi untuk meminimalisir beban administrasi dan bisa fokus pada mentoring guru di sekolah.

Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi menyebut mengenai kualitas guru, tidak lepas dari bagaimana komitmen pemerintah meningkatkan profesi dan kesejahteraannya. Pemerintah dinilai belum serius dalam memberikan pelatihan kepada para guru untuk memperbaiki kualitasnya. "Tetapi, tidak bisa hanya *ngomong* kualitas gurunya saja," tegasnya.

Menurutnya, pelatihan guru harus dilakukan secara sistematis. Tidak bisa hanya di kota-kota besar, guru-guru di pelosok juga harus dilatih sehingga kualitas pendidikan antara di kota besar dan daerah bisa setara dan mutu pendidikan menjadi lebih baik.

Selain itu, sarana dan prasarana penunjang pendidikan harus dilengkapi. Berkaca pada situasi pandemi virus corona, banyak guru dan siswa—khususnya di daerah-daerah terpencil dan terluar—tidak memiliki gawai dan sambungan internet agar tetap aktif dalam kegiatan belajar mengajar sesuai arahan pemerintah.

Pemerintah juga perlu memerhatikan kesejahteraan para guru. Unifah mengungkapkan pemenuhan kebutuhan guru selama ini sangat minim. Apalagi pemerintah memangkas anggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dari Rp53,83 miliar menjadi Rp50,88 miliar. "Itu *kan* hak guru. Kenapa enggak dipotong anggaran lain saja, seperti dana perjalanan dinas, dan organisasi kemasyarakatan. Jangan memotong gaji guru," tegasnya.

Sementara itu, Unifah berharap ada rekrutmen baru untuk guru negeri, seperti dengan mengangkat guru honorer yang masa pengabdianya mencukupi, menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Pengangkatan guru honorer ini diyakini bisa meningkatkan kualitas guru karena ada jaminan dari pemerintah yang serius memperhatikan nasib guru.

Peneliti Sosiologi Pendidikan di Pusat Penelitian Kependidikan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Anggi Afriansyah menilai, kualitas guru di Indonesia memang belum merata di seluruh wilayah. Hal itu lantaran guru menghadapi berbagai tantangan dan juga problematika, mulai dari penguasaan materi ajar, keterampilan di bidang teknologi dan adaptasinya terhadap digitalisasi, adanya gap dengan siswa yang diajarnya terutama Generasi Z, serta beban administratif yang masih besar.

Untuk itu dibutuhkan pendekatan khusus untuk meningkatkan

kualitas guru a.l. guru harus dibekali kemampuan yang responsif terhadap isu kultural terutama di daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T); Terpenuhinya kesejahteraan, khususnya untuk guru honorer; Peningkatan keterampilan seperti kesempatan magang, peningkatan kualifikasi akademik, dan beasiswa; dan kreativitas dalam mengajar.

Pelatihan guru sangat diperlukan, terutama di daerah 3T. Namun metodenya bukan dengan pola masa/seminar sebagaimana diterapkan selama ini, karena cara-cara itu kurang efektif. "Pelatihan yang dibuat biasanya seragam dalam pola dan materi, sementara Indonesia begitu beragam. Beda daerah tentu memerlukan pendekatan pendidikan yang berbeda," tuturnya.

Dia menyarankan, guna meningkatkan perluasan pelatihan, bisa dilakukan dengan menggunakan internet, sehingga akan lebih banyak guru yang mengakses dengan biaya murah. Syaratnya, akses internet harus disediakan pemerintah dengan cara menggendong provider telekomunikasi untuk memperluas jaringan guna mendukung program pelatihan mandiri berbasis internet.

"Peralatan seperti laptop/tablet perlu disediakan. Investasi model ini akan mahal di awal, tetapi jika dilakukan secara berkesinambungan akan sangat berdampak pada kapasitas guru."

Anggi menambahkan, inisiatif guru secara mandiri perlu didorong terus menerus. Program guru penggerak yang dicanangkan pemerintah sebetulnya mengarah pada pemberdayaan guru secara mandiri untuk memajukan pendidikan. Namun, tanpa dukungan pemerintah daerah hal tersebut akan sulit digulirkan.

TUGAS ADMINISTRATIF

Sementara itu, Anggota Komisi X DPR Zainuddin Maliki menekankan agar guru jangan disandera dengan kewajiban memburu sertifikasi, karena persoalan pendidikan bukan sebatas sertifikasi. Selama ini, guru juga banyak dibebani tugas administratif yang urgensinya rendah bagi kepentingan menjalankan tugas pedagogisnya.

Misalnya, guru diminta menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dengan rumusan yang sangat detail. Tujuan pembelajaran harus dirumuskan dalam empat jenis kompetensi inti, meliputi kompetensi yang mencerminkan sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan.

Dia menilai, titik masalahnya bukan pada unsur kompetensi yang harus dirumuskan, tetapi karena terlalu detail, dan seringkali rumusannya menjadi tidak fokus dan tidak jelas. "Guru lalu menjadi kehabisan waktu, yang terjadi di lapangan akhirnya jalan pintas. Guru melakukan *cloning* RPP milik orang lain," ungkapnya.

Ironisnya, urusan *cloning* atau pengklonan ini dibantu Dinas Pendidikan hingga akhirnya rumusan pembelajaran tidak spesifik, tidak unik, dan tidak kontekstual.

"Jadi, perubahan perlu dilakukan. Pekerjaan administratif yang membebani guru harus ditinggalkan. Buat rencana pembelajaran yang simpel, tetapi jelas sasarannya. Dengan begitu guru tidak kehilangan kesempatan untuk mengembangkan diri," ujarnya.

Dia menambahkan, saat ini dunia memasuki era industri 4.0 yang makin heterogen dan kompleks. Untuk menghadapi kompleksitas masyarakat dewasa ini, pendidikan Indonesia tidak bisa lagi menghabiskan waktu hanya untuk mencari rumusan standardisasi guru yang diterapkan secara general. Zainuddin merekomendasikan agar Kemendikbud sebaiknya menyiapkan guru berkepribadian fleksibel dan adaptif menghadapi dinamika dunia yang terus berubah.

"Di tengah kehidupan yang kompleks ini yang dibutuhkan adalah kreativitas, fleksibilitas, dan kecerdasan emosional seorang guru. Saya tidak ingin Kemdikbud sibuk mencari rumusan standar guru yang baik seperti apa," tuturnya.

Menurutnya, pemerintah harus memberikan pelatihan yang sistematis untuk guru agar tercipta guru yang bisa membangun

kepercayaan pada anak didiknya. DPR juga mengusulkan agar sebaiknya dalam rekrutmen guru, dipilih calon yang memiliki *passion* untuk menjadi guru, sehingga Indonesia memiliki guru dengan jiwa mendidik.

Guna mendapatkan guru yang memiliki jiwa mendidik itu, maka perlu diperbaiki mutu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai persemaian calon guru.

Zainuddin menyarankan agar LPTK diberi anggaran yang cukup untuk bisa menghasilkan guru-guru profesional dan menjadikannya sebagai lembaga yang berwibawa. Selama ini, mahasiswa yang memilih belajar di LPTK, sebagian besar karena mereka sudah tidak diterima di perguruan tinggi favorit yang lain.

Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan kurikulum yang progresif. Jangan lagi merancang kurikulum yang hanya untuk mengantar siswa lulus ujian dengan maksud mengejar hasil nilai tinggi. "Kalau masih saja *score test* yang dikejar, tidak perlu menyiapkan guru, dan bahkan tidak perlu menyiapkan sekolah," ujarnya. **2**

Statistik Guru & Tenaga Pendidik (GTK) di Indonesia

| Kategori | Jumlah | Status |
|---------------------------------|-----------|--------------------------------|
| PNS | 1.688.466 | Berdasarkan Status Kepegawaian |
| Guru Honor Sekolah | 1.034.604 | |
| Guru Tetap Yayasan (GTY) | 842.223 | |
| GTT Kabupaten/Kota | 171.657 | |
| Guru Tidak Tetap (GTT) Provinsi | 17.523 | |
| Guru Bantu Pusat | 2.996 | |
| Guru Lainnya | 114.449 | |
| Total: 19.014 | | Total: 3.871.918 |
| Pemilik Kompetensi Khusus | 5.562 | Berdasarkan Kompetensi |
| Memiliki Keahlian/Keilmuan (KK) | 2.606 | |
| Kehalusan Braille | 10.846 | |
| Keahlian Bahasa Isyarat | | |

Sumber: Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020.

BISNIS/RADITYO EKO

Berdasarkan Sertifikasi

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------|-----------------|-------|--|--------|--------------------|-----|------------------------|---|--------------------|--------|--------------|------------------|
| Sertifikat Pendidik (PSPL) | 1.461.897 | Portofolio (PF) | 5.934 | Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (PLPG) | 79.902 | Sertifikat Induksi | 197 | Pelatihan Profesi Guru | 1 | Sertifikat Lainnya | 13.645 | Total | 1.554.576 |
|----------------------------|-----------|-----------------|-------|--|--------|--------------------|-----|------------------------|---|--------------------|--------|--------------|------------------|

Bimbel Online Kian Berkibar



- Konvensional**
- (+) Siswa dapat langsung berinteraksi dengan pengajar dan teman-teman lainnya.
 - (+) Siswa bisa memiliki pemahaman yang lebih mendalam.
 - (-) Aksesnya terbatas.
- Online**
- (+) Mudah diakses dimana saja dan kapan saja.
 - (+) Memiliki banyak video pembelajaran yang bebas diakses oleh setiap siswa.
 - (-) Tidak dapat berinteraksi langsung dengan pengajar dan teman-teman yang lain.

Plus Minus Bimbel Online dan Konvensional

Program belajar dari rumah terkait wabah virus corona membuat bimbingan belajar *online* makin meluas, karena dinilai paling siap dalam penerapannya.

DEWI ANDRIANI
dewi.andriani@bisnis.com

Layanan bimbingan belajar atau bimbel, menjadi ladang bisnis menarik. Diperkirakan, sekitar 2.000 lembaga telah menyelenggarakan jasa itu. Kini, selain lembaga pendidikan atau bimbingan belajar konvensional, perusahaan rintisan pun mengembangkan platform belajar secara *online* seperti Ruang Guru, Quipper, dan Zenius.

Sabda PS, Co Founder dan Chief Education Officer Zenius mengatakan, kehadiran *platform* belajar *online* memberikan pengalaman belajar yang berbeda kepada siswa-siswi karena proses belajar yang lebih personal, sehingga siswa dapat memilih dan mengulang topik yang belum dipahami sesuai kebutuhan dan kenyamanan waktu.

Zenius, katanya, memberikan materi pengajaran berbasis konsep dan tidak menggunakan rumus cepat, sehingga para pelajar diproyeksikan dapat memahami ilmu pengetahuan secara menyeluruh, bukan menjadi generasi menghafal.

Untuk itulah, dalam setiap materi video pembelajaran Zenius dikemas dengan berfokus pada pendalaman konsep tersebut, sehingga para siswa dapat memiliki pola pikir yang sistematis yang mampu memecahkan masalah.

"Pendekatan yang kami lakukan bukan membuat bagaimana siswa dapat menjawab soal dengan cara cepat, tetapi justru memahami konsep agar terbentuk pola pikir sistematis dan terstruktur," ujarnya.

Terkait kondisi pada wabah Covid-19 ini, Zenius meluncurkan Zenius Live yang setiap harinya pada jam tertentu para tutor akan mengajar secara langsung (*live teaching*), dilengkapi dengan fitur *live chat*, sehingga para peserta didik bisa langsung memberikan pertanyaan kepada tutor. "Tentu ini adalah pengalaman yang berbeda dibanding hanya belajar dari video saja," tambahnya.

Sementara itu, untuk memaksimalkan persiapan kelas 12 menghadapi Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK), pihaknya menyiapkan latihan harian dengan soal yang rutin diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan terbaru.

"Saat ini masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya. Akses ke 80.000 lebih video pembelajaran Zenius gratis, ditambah kerja sama dengan banyak provider internet, membuat akses ke aplikasi kami menjadi gratis total," tuturnya.

Ruth Ayu Hapsari Business Development Manager Quipper mengatakan, pada dasarnya platform belajar daring berperan sebagai pelengkap bagi pendidikan formal anak di sekolah.

Namun, adanya wabah Covid-19 yang mengharuskan siswa belajar dari rumah, membuat kehadiran platform belajar *online* justru menjadi media pembelajaran yang bisa dimanfaatkan oleh guru dan siswa untuk memfasilitasi kegiatan belajar mengajar.

Quipper sendiri melalui inisiatif *#BisaTetapBelajar* menyediakan sistem dan materi pembelajaran *online* secara gratis untuk guru dan siswa yang terkena dampak dari penutupan sekolah dikarenakan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Guru dan siswa dapat mengakses lebih dari 10.000 video dan 75.000 soal yang mencakup materi Kelas 9 - 12.

"Sejak 16 Maret ada lebih dari 58.000 tugas yang dikirim oleh ribuan guru, 32 juta pertanyaan yang dijawab oleh siswa, 7.500 sekolah yang menggunakan Quipper dan lebih dari 45.000 kelas yang dibuat," ujarnya.

Hingga saat ini total pengguna Quipper di seluruh Indonesia mencapai lebih dari 6 juta siswa dan 400.000 guru yang telah bergabung. Quipper menghadirkan Super Teacher dari berbagai latar belakang pendidikan yang akan membantu siswa untuk memahami materi pelajaran dengan lebih mudah disertai dengan metode Super atau Solusi Quipper.

Selain menyediakan fasilitas pembelajaran gratis, Quipper

juga memiliki layanan premium yang bisa didapatkan oleh siswa dengan berlangganan mulai dari Rp480.000. Di sini, para siswa bisa memilih paket-paket yang sesuai dengan kebutuhannya.

Selain meluncurkan *all-new* Quipper atau aplikasi dengan wajah baru Quipper pada Oktober 2019, inovasi lain yang paling baru dilakukan adalah menyediakan teknologi pengindeks transkripsi suara.

Melalui teknologi ini, siswa bisa dengan mudah melakukan pencarian kata kunci, topik, atau materi tertentu yang muncul atau disebutkan di dalam video. Teknologi ini juga dapat mendeteksi kata kunci berdasarkan kata-kata yang diucapkan oleh guru dalam video dan histori belajar siswa pada akun Quipper.

Selain itu, terdapat juga layanan Masterclass, yang memungkinkan siswa untuk langsung berdiskusi materi, pekerjaan rumah, dan mata pelajaran dengan tutor dan berkonsultasi mengenai rencana belajar dan universitas dengan *coach*.

BIMBEL KONVENSIONAL

Kehadiran platform belajar *online* nyatanya tidak serta merta dilihat sebagai tantangan bagi bimbingan belajar konvensional. Sebab, bagaimanapun metode yang diajarkan pun berbeda. Selain itu, kehadiran *platform* belajar *online* ini juga dapat memacu kreativitas dari para pelaku bisnis pendidikan konvensional, sehingga lebih kreatif dalam mengajar dan memberikan metode yang lebih beragam.

Dwiyanto Bayu Asmoro, Senior Manager Eye Level Indonesia mengatakan Eye Level sendiri memiliki keunggulan yang membedakannya dari lembaga pendidikan lainnya, yaitu materi pembelajaran *critical thinking math* yang membantu anak berpikir kritis dan mampu memecahkan masalah melalui latihan soal matematika.

Critical thinking ini juga akan berguna bagi masa depan anak untuk memecahkan masalah dalam setiap persoalan.

"Bisnis pendidikan akan selalu memiliki pasarnya. Apalagi setelah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem Makarim menyebutkan kalau pendidikan di Indonesia akan ditambahkan metode berpikir kritis atau *critical thinking metode*. Eye Level sendiri sudah lebih dulu ada melalui materi pembelajaran *critical thinking math*," ujarnya.

Selain itu, Eye Level juga menawarkan model pendidikan karakter untuk melatih pengembangan kemandirian anak, melatih anak menjadi *problem solver* dan melatih anak menjadi pembelajar seumur hidupnya. Dengan demikian, kehadiran Eye Level tidak hanya untuk pendidikan tetapi mempersiapkan anak-anak untuk dapat berpikir kritis yang akan bermanfaat secara jangka panjang.

Kehadiran *startup* bimbel secara *online*, menurutnya, tidak akan mempengaruhi lini bisnis dari Eye Level sebab dia masih meyakini bahwa pendidikan terbaik memiliki proses interaksi, baik secara psikologis maupun sosial.

Meski demikian, persebaran COVID-19 ini mengharuskan lembaga pendidikan konvensional untuk ikut beradaptasi dengan dunia digital. Bayu menuturkan bahwa mulai Maret, pihaknya sudah meluncurkan Eye Level On Air dengan membuat ruang kelas virtual.

"Kami sudah ada *booklet* lembar kerja, anak-anak bisa bekerja dari situ, guru-guru bisa memberikan penjelasan secara langsung melalui fitur *white board virtual*, ada juga fitur koreksi nilai sehingga anak-anak bisa langsung mengoreksi jawaban atas latihan. Jadi meski secara *online* tetapi tetap ada interaksi," ujarnya.

Investor asal Korea, Eye Level sudah memiliki persiapan dari segi infrastruktur teknologi. Namun, yang menjadi tantangan justru infrastruktur jaringan di Indonesia yang belum stabil, terutama di daerah tingkat kabupaten sehingga terkadang penjelasaannya menjadi *delay*.

Profil Bimbel



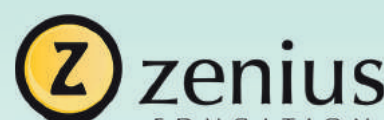
- Asal Negara: Korea Selatan
- Masuk Indonesia: 2007
- Jumlah Cabang: 104
- Total siswa: 2.000-30.000
- Biaya pendaftaran: Rp200.000-Rp250.000
- Biaya dan Layanan:
 - Jabodetabek:
 - Matematika : Rp450.000/bulan
 - Critical Thinking Math: Rp480.000/bulan
 - English : Rp500.000/bulan
 - Luar Jabodetabek:
 - Matematika : Rp350.000/bulan
 - Critical Thinking Math: Rp380.000/bulan
 - English: Rp400.000 / bulan

Sumber: Berbagai sumber diolah

Profil Bimbel Daring



- Asal Negara: Inggris
- Masuk Indonesia: 2015
- Biaya Berlangganan Premium: Rp480.000
- Total pengguna Quipper: 6 juta siswa dan 400.000 guru
- Jumlah akses video: 10.000 video dengan 75.000 soal (akses gratis)
- Layanan:
 - Quipper School (SMP dan SMA)
 - Quipper Video (SMP dan SMA kelas 9-12)
 - Quipper Video Masterclass (SMA Kelas 10-12)
 - Quipper Campus (SMA dan sederajat)



- Asal Negara: Indonesia
- Pendiri: Sabda PS
- Didirikan tahun: 2007
- Biaya Berlangganan Premium: Rp313.000 per bulan (gratis)
- Total pengguna Zenius: 11,8 juta siswa
- Jumlah akses video: 80.000 video
- Materi Pembelajaran:
 - Matematika, IPA, IPS, Bahasa (SD, SMP, SMA)
 - Ujian Nasional
 - UTBK, SNMPTN

BISNIS/RADITYO EKO



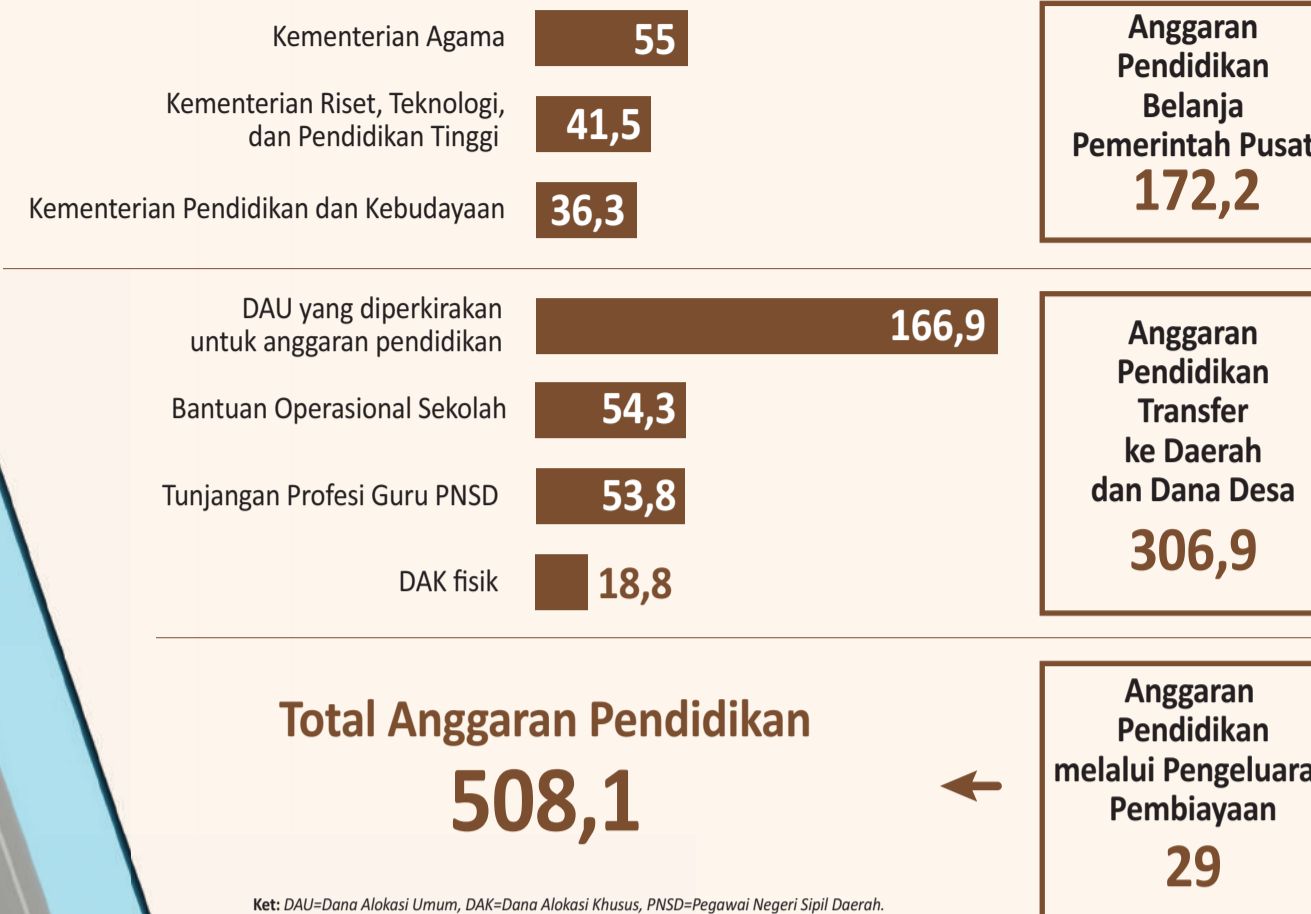
- Asal Negara: Indonesia
- Pendiri: Adamas Belva Devara dan Iman Usman
- Didirikan tahun: 2014
- Biaya Berlangganan : mulai dari Rp250.000 per bulan
- Total pengguna: Lebih dari 15 juta pengguna dan mengelola 300.000 guru
- Jumlah Materi: Lebih dari 100 bidang pelajaran
- Layanan:
 - Ruangbelajar
 - Ruanglesonline
 - Ruangbelajar Plus
 - Ruanguji
 - Ruangles
 - Ruangbaca

MEMACU KUALITAS PENDIDIKAN NASIONAL

Pemerintah telah menetapkan strategi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional. Sejumlah kebijakan dan program dalam sektor pendidikan telah dipetakan sesuai dengan target dan dukungan alokasi anggarannya, baik secara nasional, pusat maupun daerah.



Anggaran Pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2020 (Rp triliun)

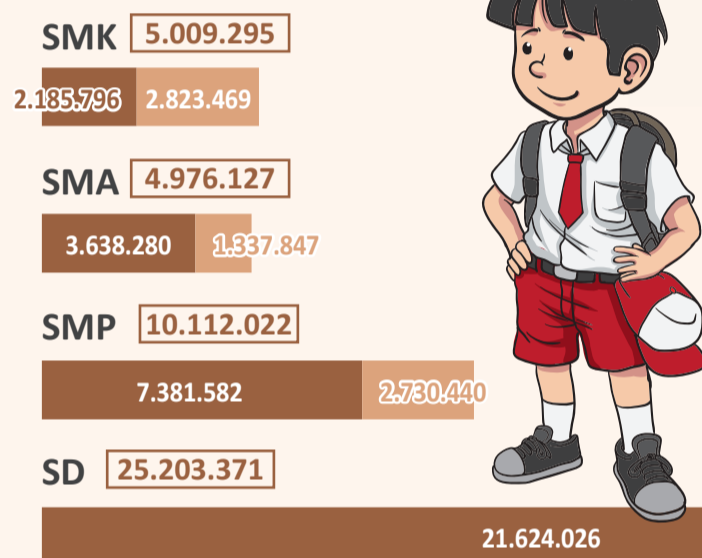


Ket: DAU=Dana Alokasi Umum, DAK=Dana Alokasi Khusus, PNSD=Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Perkembangan Dana Pendidikan

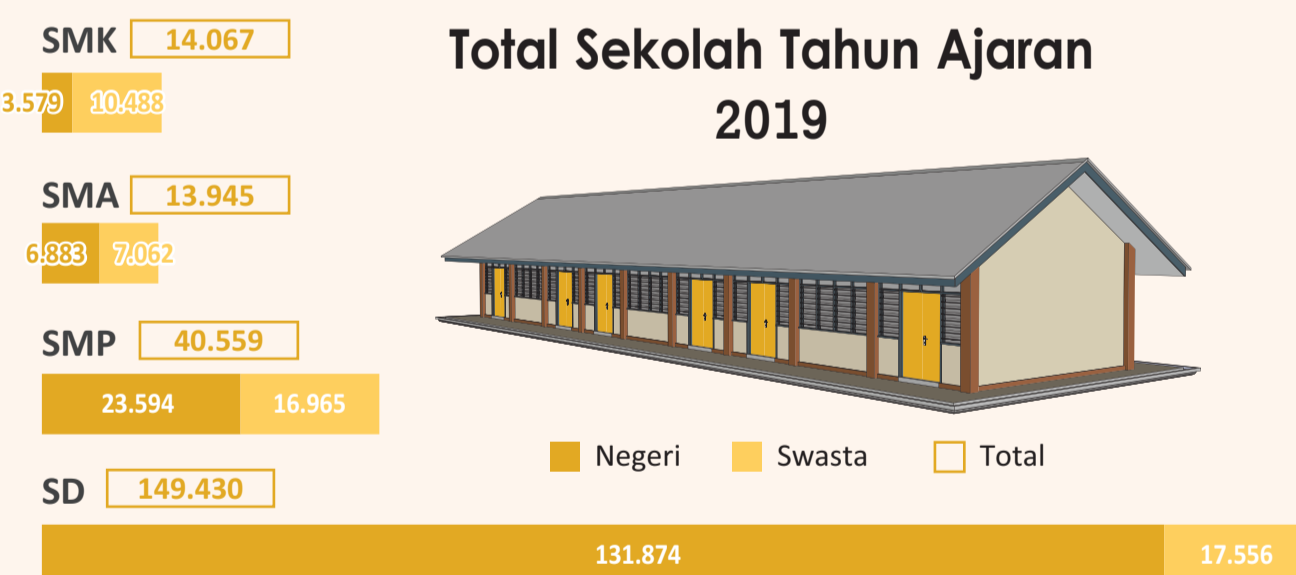


Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara



Total Siswa Tahun Ajaran 2019

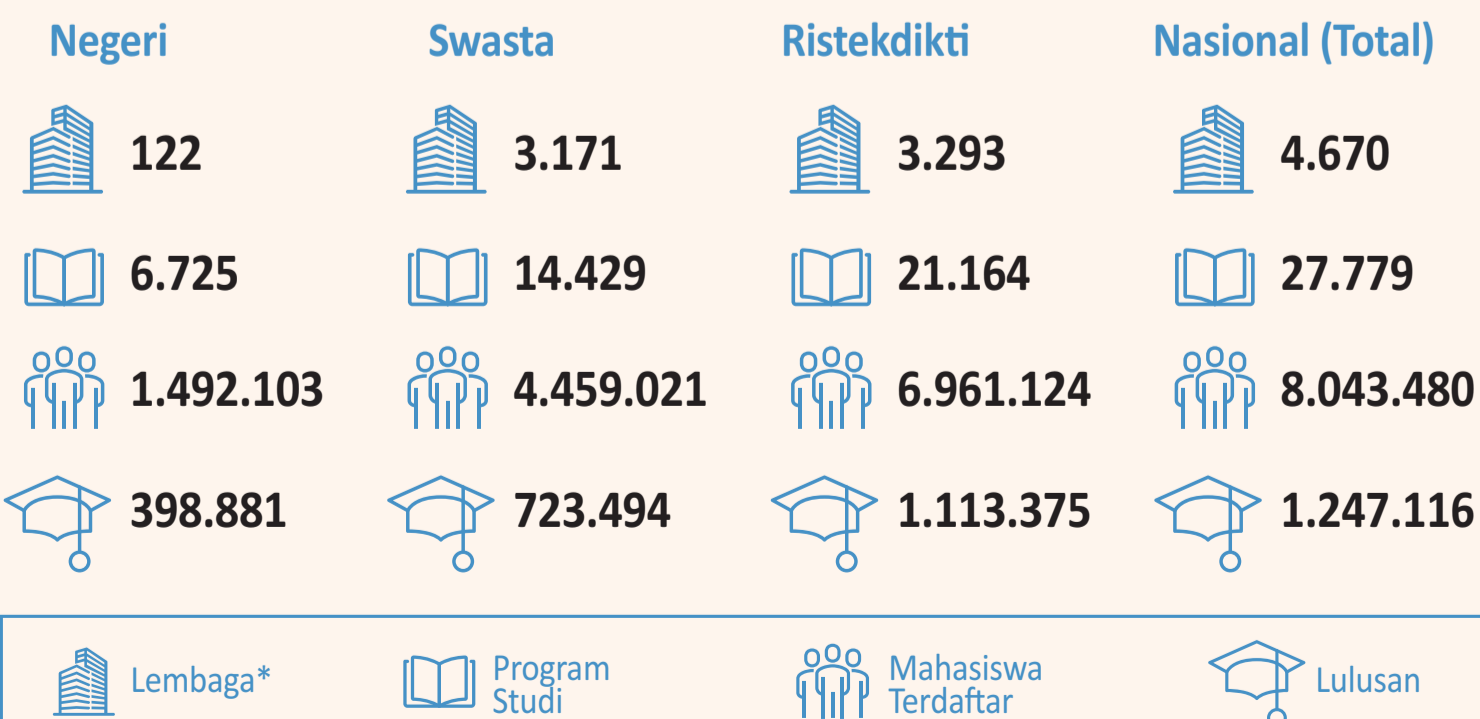
■ Negeri
■ Swasta
□ Total



Total Sekolah Tahun Ajaran 2019

■ Negeri ■ Swasta □ Total

Total Perguruan Tinggi



Ket: *Lembaga perguruan tinggi yang termasuk di dalamnya adalah lembaga Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Akademi, Akademi Komunitas, dan Politeknik. Selisih dari angka nasional dan ristekdikti adalah lembaga lain (di luar perguruan tinggi negeri dan swasta) misalnya perguruan tinggi agama dan perguruan tinggi di bawah kementerian atau lembaga negara lain.

Sumber: Pusat Data dan Statistik Pendidikan, 2019, Statistik Pendidikan Tinggi, Badan Pusat Statistik, berbagai sumber, diolah

Kebijakan Pendidikan 2020

Perluasan Akses Pendidikan Dari Usia Dini sampai dengan Pendidikan Tinggi.

Melanjutkan bantuan pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar [KIP] dan Bantuan Operasional Sekolah [BOS].

KIP Kuliah [perluasan/ penyempurnaan bidik misi].

Mendukung Keberlanjutan Pendanaan Terkait Pendidikan Melalui Investasi Pemerintah.

Dana abadi pendidikan.

Dana abadi penelitian.

Dana abadi perguruan tinggi.

Dana abadi kebudayaan.

Melanjutkan Percepatan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan.*

Meningkatkan kualitas dan keterampilan sumber daya manusia pendidikan vokasi: penguasaan keahlian, kewirausahaan, dan teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan industri.

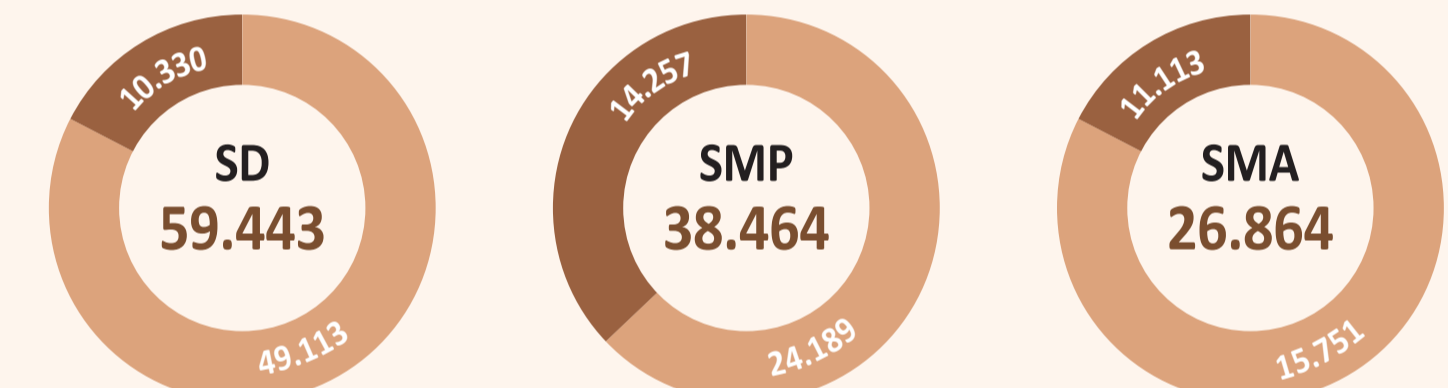
Kartu pra kerja.

Ket: *melalui Kementerian PUPR dan Dana Alokasi Khusus Fisik.

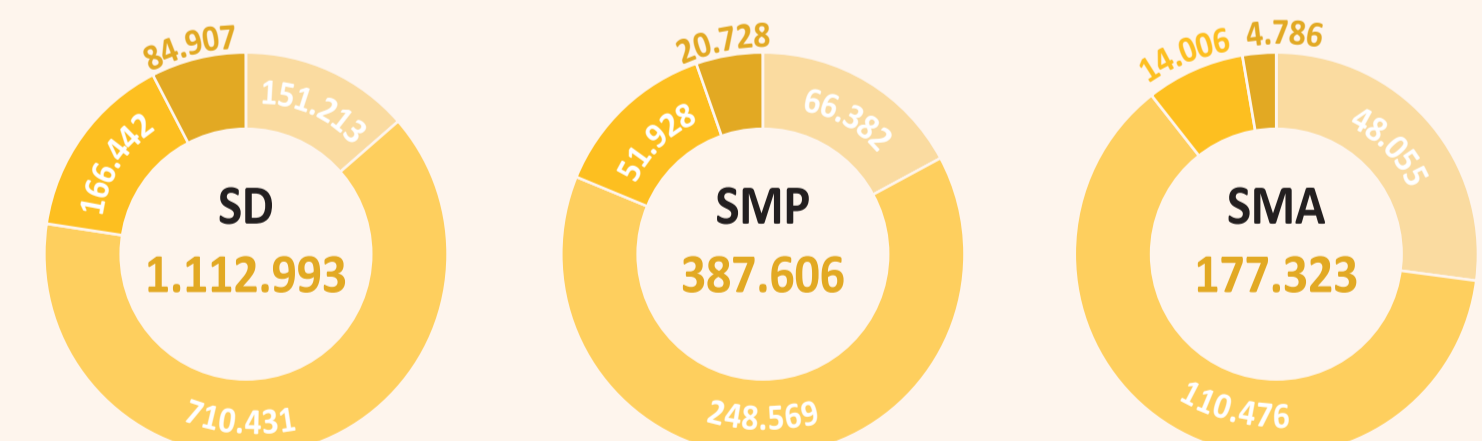
● Baik
● Rusak Ringan
● Rusak Sedang
● Rusak Berat

Jumlah Siswa Putus Sekolah 2019

● Swasta
● Negeri



Jumlah Ruang Kelas 2019



Target-target dalam Sektor Pendidikan Nasional

| Program | Target | Anggaran |
|---|--|----------------|
| Riset Layanan Beasiswa dan Pendanaan Riset Indonesia [LPDP] | 104 riset | Rp284,1 miliar |
| Beasiswa bagi Strata-2/Strata-3 | 5.000 mahasiswa baru dan 12.333 mahasiswa lanjutan | Rp1,8 triliun |
| Kartu Indonesia Pintar – Kuliah | 819.400 mahasiswa | Rp6,7 triliun |
| Kartu Indonesia Pintar – SD, SMP, SMA dan Sederajat | 20,1 juta siswa | Rp11,1 triliun |
| Bantuan Operasional Pendidikan [Pendidikan Anak Usia Dini [DAK Non Fisik] | 7,4 juta anak | Rp4,5 triliun |
| Bantuan Operasional Sekolah | 54,8 juta siswa atau 271.000 sekolah umum/madrasah | Rp64 triliun |
| Sarana Dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini | 5.841 ruang kelas | Rp307,6 miliar |
| Bangun/Rehabilitasi Ruang Kelas | 14.500 ruang kelas atau 1.175 sekolah | Rp8 triliun |
| Bangun/Rehabilitasi Kampus | 41 kampus | Rp4,4 triliun |

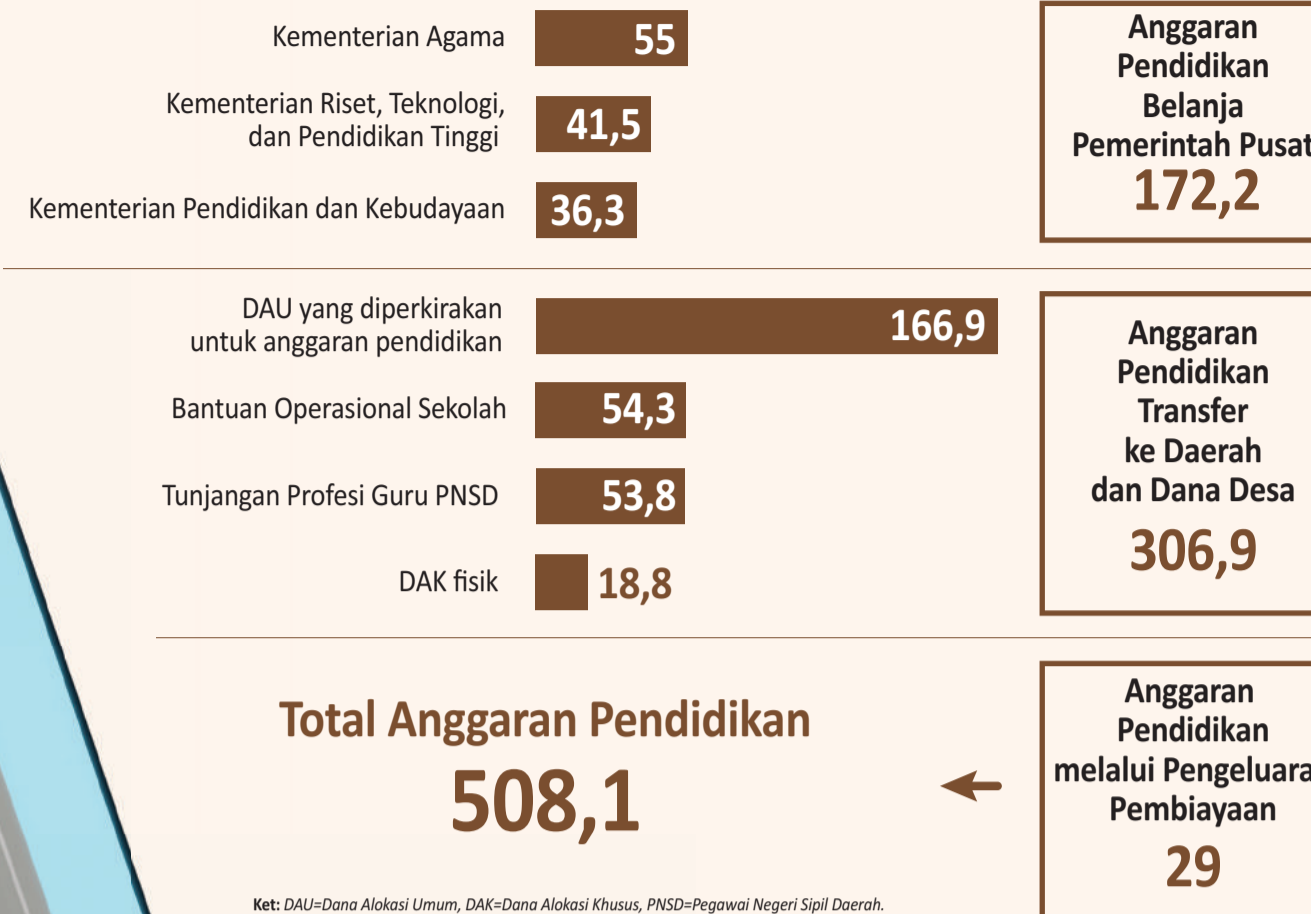
BISIS/RONI YUNIANTO/
SIAIFUL MILLAH/TRI UTOMO/
ZOYA RASYIDI

MEMACU KUALITAS PENDIDIKAN NASIONAL

Pemerintah telah menetapkan strategi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional. Sejumlah kebijakan dan program dalam sektor pendidikan telah dipetakan sesuai dengan target dan dukungan alokasi anggarannya, baik secara nasional, pusat maupun daerah.

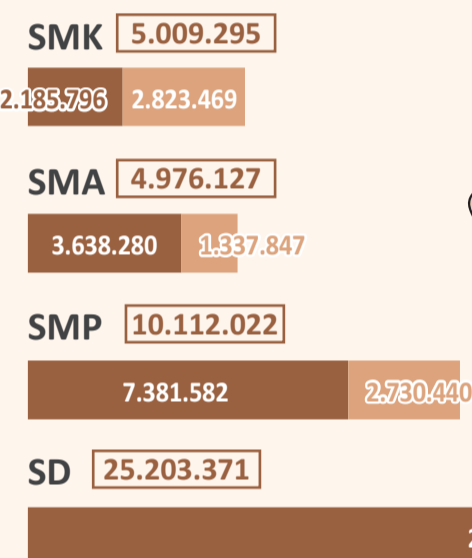


Anggaran Pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2020 (Rp triliun)



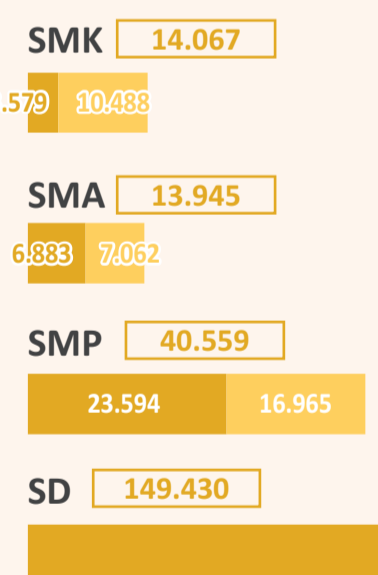
Ket: DAU=Dana Alokasi Umum, DAK=Dana Alokasi Khusus, PNSD=Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Perkembangan Dana Pendidikan



Total Siswa Tahun Ajaran 2019

■ Negeri
■ Swasta
□ Total



Total Sekolah Tahun Ajaran 2019



■ Negeri ■ Swasta □ Total

Total Perguruan Tinggi

| Negeri | Swasta | Ristekdikti | Nasional (Total) |
|---------------------|-----------|-------------|------------------|
| Lembaga* | 3.171 | 3.293 | 4.670 |
| Program Studi | 14.429 | 21.164 | 27.779 |
| Mahasiswa Terdaftar | 4.459.021 | 6.961.124 | 8.043.480 |
| Lulusan | 723.494 | 1.113.375 | 1.247.116 |

Ket: *Lembaga perguruan tinggi yang termasuk di dalamnya adalah lembaga Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Akademi, Akademi Komunitas, dan Politeknik. Selsih dari angka nasional dan ristekdikti adalah lembaga lain (di luar perguruan tinggi negeri dan swasta) misalnya perguruan tinggi agama dan perguruan tinggi di bawah kementerian atau lembaga negara lain.

Sumber: Pusat Data dan Statistik Pendidikan, 2019, Statistik Pendidikan Tinggi, Badan Pusat Statistik, berbagai sumber, diolah

Kebijakan Pendidikan 2020

Perluasan Akses Pendidikan Dari Usia Dini sampai dengan Pendidikan Tinggi.
Melanjutkan bantuan pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar [KIP] dan Bantuan Operasional Sekolah [BOS].
KIP Kuliah [perluasan/penyempurnaan bidik misi].

Mendukung Keberlanjutan Pendanaan Terkait Pendidikan Melalui Investasi Pemerintah.
Dana abadi pendidikan.
Dana abadi penelitian.
Dana abadi perguruan tinggi.
Dana abadi kebudayaan.

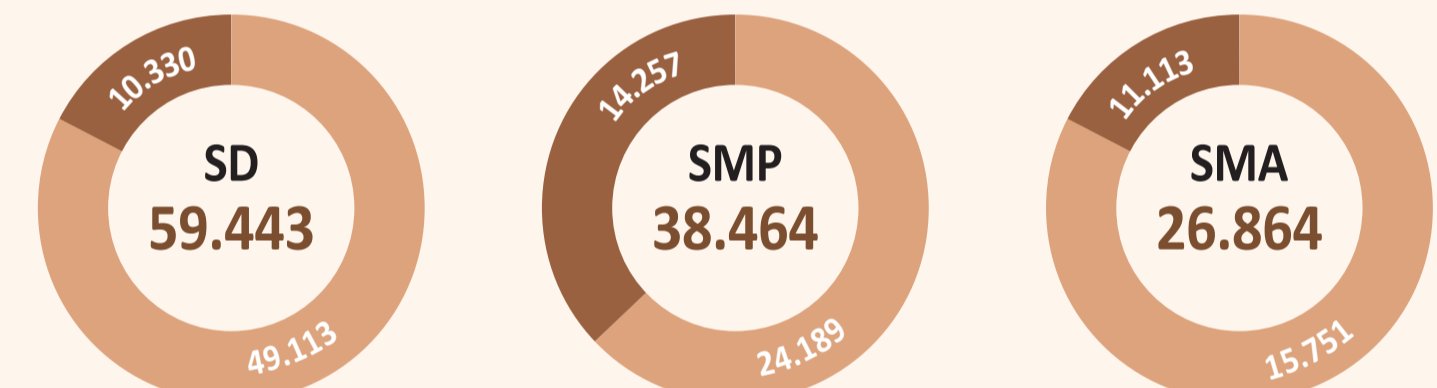
Melanjutkan Percepatan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan.*
Meningkatkan kualitas dan keterampilan sumber daya manusia pendidikan vokasi: penguasaan keahlian, kewirausahaan, dan teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan industri.
Kartu pra kerja.

Ket: *melalui Kementerian PUPR dan Dana Alokasi Khusus Fisik.

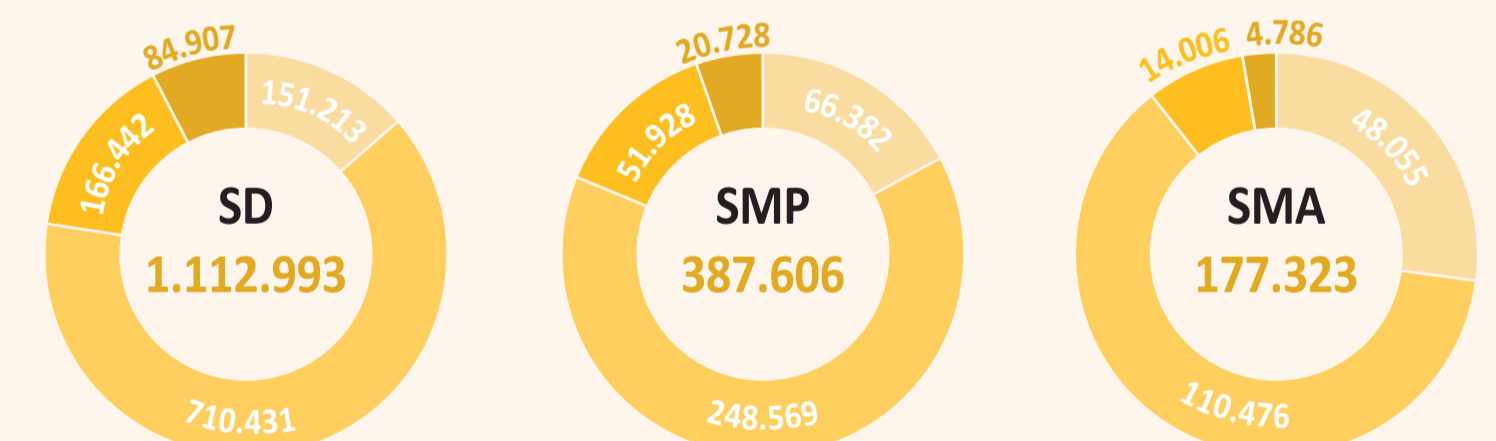
● Baik
● Rusak Ringan
● Rusak Sedang
● Rusak Berat

Jumlah Siswa Putus Sekolah 2019

● Swasta
● Negeri



Jumlah Ruang Kelas 2019

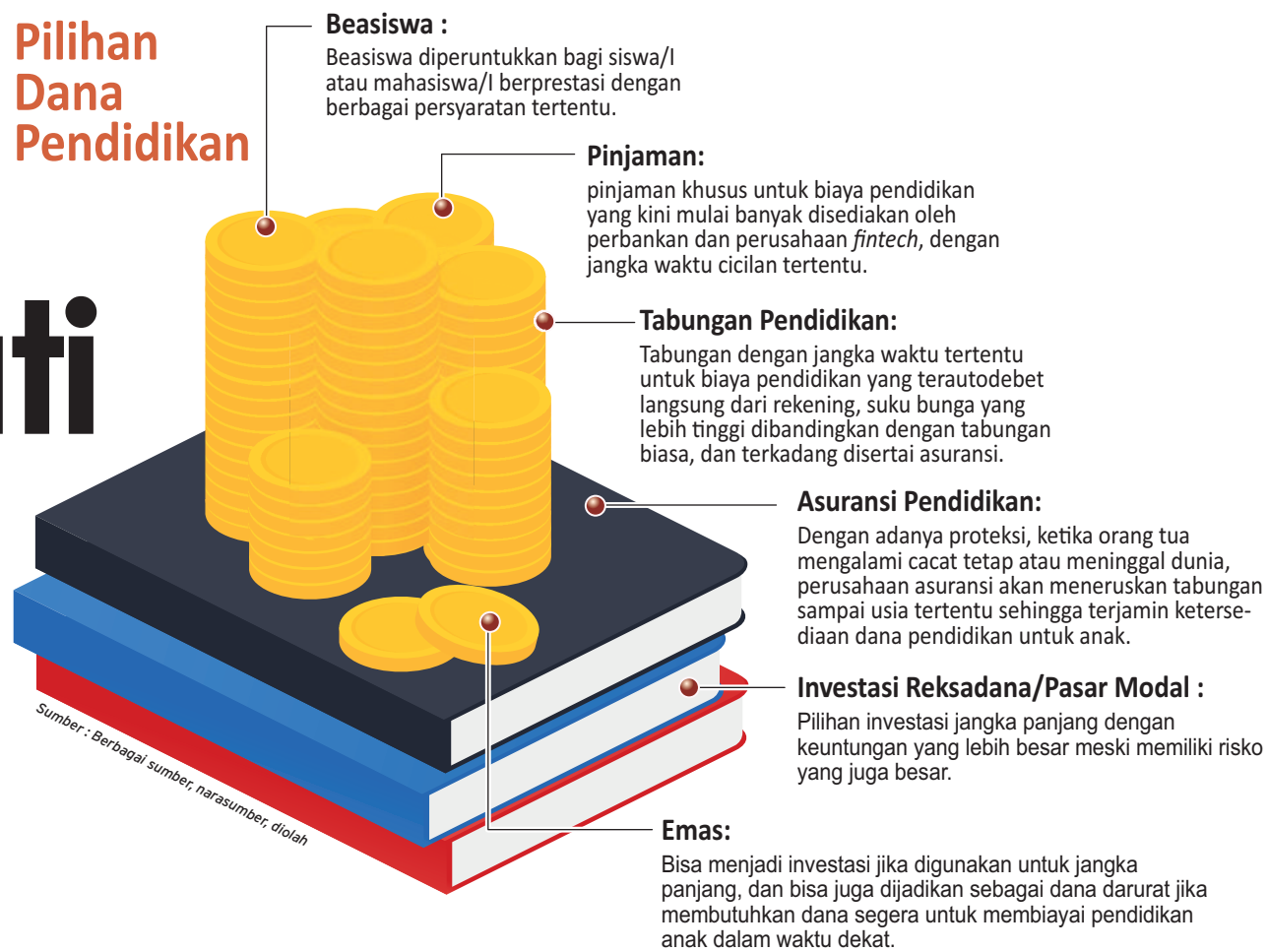


Target-target dalam Sektor Pendidikan Nasional

| Program | Target | Anggaran |
|---|--|----------------|
| Riset Layanan Beasiswa dan Pendanaan Riset Indonesia [LPDP] | 104 riset | Rp284,1 miliar |
| Beasiswa bagi Strata-2/Strata-3 | 5.000 mahasiswa baru dan 12.333 mahasiswa lanjutan | Rp1,8 triliun |
| Kartu Indonesia Pintar – Kuliah | 819.400 mahasiswa | Rp6,7 triliun |
| Kartu Indonesia Pintar – SD, SMP, SMA dan Sederajat | 20,1 juta siswa | Rp11,1 triliun |
| Bantuan Operasional Pendidikan [Pendidikan Anak Usia Dini [DAK Non Fisik] | 7,4 juta anak | Rp4,5 triliun |
| Bantuan Operasional Sekolah | 54,8 juta siswa atau 271.000 sekolah umum/madrasah | Rp64 triliun |
| Sarana Dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini | 5.841 ruang kelas | Rp307,6 miliar |
| Bangun/Rehabilitasi Ruang Kelas | 14.500 ruang kelas atau 1.175 sekolah | Rp8 triliun |
| Bangun/Rehabilitasi Kampus | 41 kampus | Rp4,4 triliun |

BISIS/RONI YUNIANTO/
SIAIFUL MILLAH/TRI UTOMO/
ZOYA RASYIDI

Ragam Cara Siasati Biaya Sekolah



Biaya sekolah anak yang makin tinggi harus diantisipasi orang tua. Ada beberapa cara yang ditempuh, dari menabung, mengupayakan beasiswa, asuransi, hingga pinjaman pendidikan yang kini marak ditawarkan teknologi finansial.

DEWI ANDRIANI
dewi.andriani@bisnis.com

Mempersiapkan alokasi dana pendidikan harus dilakukan sedini mungkin agar tak terbebani di kemudian hari. Pasalnya menurut Badan Pusat Statistik, setiap tahun biaya pendidikan terus meningkat rata-rata sekitar 10%.

Namun, tidak sedikit juga yang ternyata belum mempersiapkan anggaran khusus untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

Berdasarkan kajian HSBC bertajuk *Value of Education-The Price of Success* pada 2018, sekitar 63% orang tua berharap memiliki persiapan finansial untuk pendidikan anak, sedangkan 34% orang tua khawatir tidak memiliki tabungan yang cukup.

Saat anak mulai kuliah, sekitar 85% orang tua membiayai kuliah dengan pendapatan bulanan, dan hanya 44% orang tua yang membiayai pendidikan anaknya dari tabungan khusus pendidikan.

Alhasil, sebanyak 69% orang tua berhenti menikmati hidup, hingga 54% mencari penghasilan tambahan. Sedangkan 47% orang tua mengaku terpaksa mengurangi hari libur.

Perencana Keuangan dari Oneshildt Financial Budi Raharjo mengatakan bahwa dana pendidikan sebaiknya direncanakan sejak anak lahir. "Persiapan dana pendidikan ini sudah harus dibuat tabungan khusus. Mungkin sekitar Rp300.000 atau Rp500.000 per bulan, sehingga ketika anak masuk sekolah tidak mengganggu *cashflow*," jelasnya.

Pilihannya adalah melalui instrumen investasi atau tabungan. Untuk hal ini, perlu mempertimbangkan parameter kondisi keuangan dan profil risiko dari pihak yang akan melakukan investasi.

"Kalau kondisi keuangannya pas-pasan, harus buat rencana pendidikan dengan dana yang cukup juga, jangan berlebihan. Kalau orangnya konservatif maka produk investasinya harus yang konservatif juga. Kalau yang agresif, bisa-bisa akan stres lihat fluktuasinya," jelasnya.

Pertimbangan lainnya adalah jangka waktu pemilihan investasi. Misalnya saja, untuk mempersiapkan pendidikan *playgroup*, taman kanak-kanak (TK) atau sekolah dasar (SD) yang mungkin hanya butuh 4 atau 5 tahun ke depan, instrumen investasi atau tabungan akan berbeda dengan dana pendidikan untuk jenjang perguruan tinggi.

Budi menyebutkan pilihan instrumen investasi atau tabungan, pertama adalah tabungan pendidikan di bank, dengan memotong langsung dana dari rekening serta dana yang dialokasikan akan terkunci. Sayangnya, bunganya tidak terlalu tinggi.

Instrumen investasi berikutnya berupa asuransi pendidikan yang memiliki dua tipe yaitu konvensional dan *unit-linked*. "Instrumen *unit-linked* ini menggabungkan antara proteksi dan investasi. Kelemahannya sebagian dana dipotong biaya asuransi sehingga hasilnya kurang maksimal, tetapi ada proteksinya."

Bagi yang ingin menyiapkan dana pendidikan anak hingga perguruan tinggi, disarankan memilih instrumen investasi *unit-linked* karena kita tidak akan tahu apa yang terjadi 18 tahun mendatang.

Berikutnya adalah instrumen investasi reksa dana, dengan kelebihan memiliki pilihan investasi mulai dari instrumen yang berisiko rendah dengan keuntungan rendah, sampai yang berisiko tinggi tetapi memberikan keuntungan besar.

Alternatif lainnya adalah memilih instrumen investasi emas karena nilainya yang cenderung naik dalam jangka panjang, juga lebih mudah dicairkan jika butuh dana pendidikan dalam waktu dekat.

Novita Rumngangun, Direktur & CMO Manulife Indonesia mengatakan untuk asuransi pendidikan, Manulife memiliki program Manulife Education Protector (MEP) yang dilengkapi dengan investasi jangka panjang. Adapun minimal premi untuk asuransi pendidikan ini sebesar Rp5 juta per tahun atau sekitar Rp417.000 per bulan, atau kurang dari Rp14.000 per harinya.

Menurutnya, MEP memiliki berbagai manfaat selain dana pendidikan yang akan cair saat anak berusia 18 tahun atau saat akan mulai kuliah, tetapi juga terdapat berbagai bonus loyalitas, investasi, serta proteksi perlindungan jiwa.

"MEP juga memberikan ketersediaan dana pada setiap jenjang pendidikan mulai dari SD hingga SMA. Dengan demikian, produk ini memberikan manfaat edukasi hingga 170% dari target dana pendidikan," tuturnya.

Lani Darmawan, Direktur Konsumen Bank CIMB Niaga mengatakan tabungan pendidikan bagi nasabah sudah ada sejak lama dalam bentuk Tabungan Mapan (Masa Depan). Dalam tabungan ini nasabah bisa menentukan sendiri jangka waktu atau tenor yang diinginkan untuk mempersiapkan dana pendidikan untuk anak.

Adapun nilai tabungannya bisa berapa saja tergantung persiapan dari nasabah, dengan setoran rutin bulanan minimal Rp100.000.

"Keuntungan menggunakan tabungan pendidikan ini, para nasabah akan terbantu untuk disiplin menabung dengan jumlah tetap setiap bulannya yang akan otomatis terdebit dari rekening tabungan biasa atau *payroll* hingga mencapai jumlah yang diinginkan," ujarnya.

BUNGA LEBIH TINGGI

Jumlah nasabah Tabungan Pendidikan CIMB Niaga kini sudah mencapai sekitar 1 juta dan bertumbuh setiap tahunnya seiring dengan makin besarnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menyiapkan tabungan pendidikan anak sejak dini.

Adapun keuntungan tabungan pendidikan dibandingkan tabungan pada umumnya yaitu suku bunga yang ditawarkan lebih tinggi, misalnya saja untuk Tabungan Mapan ini, suku bunganya bisa mencapai 5% per tahun, selain nasabah juga mendapatkan jaminan asuransi dengan target dana maksimal Rp160 juta.

Usaha teknologi finansial pun menawarkan dana pinjaman pendidikan, salah satunya KoinWorks melalui program KoinPintar.

Frecy Ferry Daswaty, VP of Marketing KoinWorks mengatakan untuk membantu masyarakat yang terkendala biaya pendidikan, pihaknya telah menyiapkan alternatif pinjaman pendidikan melalui program Dekade (Dana Edukasi Masa Depan) yang dapat dicicil hingga 10 tahun.

Dana pinjaman yang bisa diajukan mulai dari Rp20 juta hingga Rp200 juta dengan bunga rata-rata 0,75% per bulan. Sementara itu, persyaratannya tidak jauh berbeda dengan pengajuan lainnya seperti mutasi rekening, KTP, dan Kartu Keluarga tetapi ada kemudahan yang diberikan.

"KoinWorks juga telah bekerja sama dengan berbagai institusi untuk memberikan kemudahan bagi peminjam. Tidak ada penalti yang kami bebankan bila peminjam ingin melunasi pinjamannya lebih awal," ujarnya.

KoinWorks tidak hanya menawarkan pinjaman untuk institusi pendidikan formal, tetapi juga institusi nonformal, seperti lembaga kursus bahasa hingga kursus kecantikan, dan *vocational*.

Hingga saat ini kontribusi penyaluran dana pendidikan di KoinWorks sekitar 10%—20% dari total penyaluran pinjaman karena memang biaya pendidikan lebih kecil angkanya dibandingkan dengan pembiayaan bisnis. Meski demikian, permintaannya terus meningkat setiap tahun. **B**



Beasiswa Pemerintah

Beasiswa DIKTI

- Program yang ditawarkan: S1, S2, S3 (dalam dan luar negeri).
- Meliputi: Biaya pendidikan, biaya hidup, biaya perjalanan.
- Target penerima beasiswa: Mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan. Khusus beasiswa luar negeri hanya untuk dosen dan tenaga kependidikan.
- Pendaftaran: <http://beasiswa.ristekdik-ti.go.id/bppdn/>

Beasiswa Bidikmisi

- Program yang ditawarkan: S1/D4.
- Biaya yang ditanggung: Biaya per semester dan uang tunjangan hidup selama delapan semester.
- Target penerima: Lulusan SMA yang berprestasi tetapi memiliki kekurangan finansial.
- Pendaftaran: <https://bidikmisi.belmawa.ristekdik-ti.go.id>

Beasiswa LPDP*

- Program yang ditawarkan: S2 dan S3 baik dalam maupun luar negeri.
- Biaya yang ditanggung: Biaya pendaftaran, SPP, tunjangan buku, biaya tesis/disertasi/penelitian, biaya wisuda, biaya transportasi pulang pergi, asuransi kesehatan, biaya aplikasi visa, biaya hidup, tunjangan keluarga, dan biaya kedatangan.
- Target penerima: Lulusan Sarjana/Mahasiswa di Universitas terakreditasi BAN-PT.
- Pendaftaran: <https://beasiswa/lpdp.kemenukeu.go.id/>

Program Beasiswa Santri Berprestasi

- Program beasiswa: S1 UGM Yogyakarta, YIN Sunan Ampel Surabaya, Unair Surabaya, dan lainnya.
- Biaya yang ditanggung: Dana pendidikan dan dana tunjangan selama delapan semester.
- Target penerima: Lulusan SMA sederajat.
- Pendaftaran: www.ditdpontren.kemendag.go.id

Sumber: berbagai sumber, diolah

*) Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

Mengolah Bakat Mengasah Potensi

Sekolah telah menjadi sarana dan prasarana untuk menunjang peningkatan mutu pendidikan nasional. Indonesia mengenal beberapa jenis sekolah yang memiliki corak dan model pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan talenta dan potensi anak didik serta tujuan yang ingin dicapai.

SYAIFUL MILLAH
redaksi@bisnis.com

SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA



- **Model Pendidikan:** Satuan Pendidikan Kerja Sama [SPK] adalah label baru dari sekolah internasional yang digelar melalui kerja sama lembaga pendidikan di Indonesia dengan lembaga pendidikan asing [LPA] ataupun bentuk izin baru dari sekolah nasional plus. Sekolah ini biasanya menggunakan Bahasa Indonesia maupun bahasa asing sebagai bahasa pengantar dan menekankan pemahaman konsep [concept based], melalui tugas individu dan kelompok serta kemampuan mempresentasikan ide. Namun, ada pula sekolah yang menekankan basis pengetahuan.
- **Akreditasi:** International Baccalaureate Organization [IB] atau Cambridge International Examination [CIE], Association of National and Private Schools (ANPS), Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah.
- **Kurikulum:** Menggabungkan kurikulum internasional [IB/CIE atau kurikulum internasional lainnya] dengan sebagian kurikulum nasional yang berlaku.



SEKOLAH NASIONAL

- **Model Pendidikan:** Sekolah nasional baik yang dikelola pemerintah [negeri] maupun yayasan mandiri [swasta] yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pendidikan ini menerapkan sejumlah kriteria, misalnya kurikulum, fasilitas, pengelolaan sekolah, kompetensi, dan

lain sebagainya sesuai dengan standar dan regulasi pemerintah. Pendidikan lebih menekankan pengetahuan [knowledge based] dengan model evaluasi murid melalui pekerjaan rumah, tes ulangan atau ujian.

- **Akreditasi:** Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.
- **Kurikulum:** Menjalankan kurikulum nasional yang berlaku.

MADRASAH

- **Model Pendidikan:** Madrasah menerapkan model pendidikan umum dan kejuruan dengan jenjang yang tidak jauh berbeda dengan sekolah nasional. Perbedaan hanya pada lembaga yang membina nya. Madrasah berada di bawah naungan Kementerian Agama. Madrasah juga dilengkapi dengan dukungan sarana, prasarana, fasilitas, dan ekstrakurikuler yang memadai.
- **Akreditasi:** Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.
- **Kurikulum:** Menjalankan kurikulum nasional yang berlaku dan menekankan pembelajaran agama Islam.



SEKOLAH ALAM

- **Model Pendidikan:** Menggunakan alam sebagai sarana belajar dan pembelajaran lebih banyak dilaksanakan di ruang terbuka.
- **Akreditasi:** Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.
- **Kurikulum:** Menjalankan kurikulum nasional yang diperkaya dengan keteladanan, logika dan praktik lapangan. Sejumlah kegiatan unik di antaranya bertani, beternak, dan bercocok tanam.



SEKOLAH RUMAH



- **Model Pendidikan:** Sekolah rumah atau *homeschooling* menerapkan belajar mandiri, nonformal, yang dapat dilaksanakan di rumah atau tempat selain sekolah, baik oleh keluarga, kolega maupun komunitas. Kegiatan ini meningkatkan kapasitas anak sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, keterampilan, dan potensi lainnya.
- **Akreditasi:** Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal. Siswa juga bisa mengikuti ujian untuk memperoleh ijazah kesetaraan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan formal.
- **Kurikulum:** Sistem pembelajaran yang dirancang sesuai dengan kebutuhan agar anak merasa senang, nyaman, dan tidak terbebani, serta fokus pada pembelajaran yang berjalan.

Premium

HIGHLIGHT



THE PAPANDAYAN MELAYANI PESAN ANTAR PAKET BUKA PUASA #DIRUMAHAJA

BANDUNG - Ramadan kali ini terasa berbeda karena kegiatan dan aktivitas rutin yang melibatkan banyak orang ditiadakan, termasuk buka puasa bersama. Menjawab kerinduan masyarakat akan aneka sajian khas berbuka puasa di Pago Restaurant – The Papandayan, The Papandayan memberikan layanan pesan antar sajian khas berbuka puasa, yakni paket Buka Puasa #dirumahaja. Ada dua paket yang ditawarkan untuk promo buka puasa #dirumahaja, yaitu paket menu untuk 1 orang dengan harga Rp75.000 nett dan paket menu untuk 4 orang dengan harga Rp270.000 nett. Berbagai makanan

utama siap dipilih mulai dari *lamb stew indian style*, sop buntut balado, gurame goreng kremes, *salmon rice bowl*, *crispy firecracker chicken* hingga *thai red beef curry*. Adapun aneka takjil seperti kolak pisang, kolak biji salak, sop buah dan puding cokelat serta aneka minuman yang terdiri dari *lychee ice tea*, *ice jasmine tea*, es kopi gula aren dan *fresh mix juice* siap dipilih untuk melengkapi hidangan berbuka puasa. Nikmati promo gratis antar untuk maksimal jarak 3 kilometer atau subsidi ongkos kirim Rp10.000 dengan melakukan pemesanan langsung ke 0811 2232 392. (*)

RAMADAN-VAGANZA DI HOTEL CIPUTRA WORLD SURABAYA



SURABAYA—Ditengah pandemic COVID-19, Hotel Ciputra World Surabaya berkomitmen menyiapkan paket Ramadan terbaik untuk para tamu. Tidak hanya paket berbuka, juga paket menginap dengan harga dan fasilitas yang cukup terjangkau.

Dengan paket *Iftar On The Go*, tim The Gallery Restaurant akan mengantarkan makanan berbuka pesanan anda sampai ke depan pintu rumah. Gratis ongkos kirim diberlakukan untuk jarak dibawah 5 kilometer. Harga minimal Rp300.000 untuk 2 orang, dan Rp1.500.000 untuk 10 orang. Sementara bagi para tamu yang ingin merasakan suasana baru dengan berbuka di luar rumah, The Gallery Restaurant juga menyediakan paket *Intimate Breakfasting Family Style* untuk 5-10 orang saja dengan harga Rp150.000 net/orang dengan minimum reservasi untuk 5 orang atau lebih. Ruangan yang digunakan pun juga sangat menjaga privasi dan tetap mengikuti aturan pemerintah untuk menjaga jarak.

Selain promo buka puasa, Hotel Ciputra World Surabaya juga menyediakan paket kamar dengan harga Rp850.000 net per malam. Promo ini sendiri berlaku mulai 23 April – 23 Mei 2020. (*)

Tetap Berprestasi Walau di Rumah



Bisnis/Nurul Hidayat

Sekolah rumah atau *homeschooling* masih dipandang sebelah mata oleh sebagian masyarakat. Mereka menganggap sekolah informal ini hanya untuk anak-anak malas. Nyatanya tidak demikian.

REZHA HADYAN
redaksi@bisnis.com

Ketika sekolah formal mewajibkan siswa untuk berseragam, belajar di dalam kelas dan diajar oleh guru, *homeschooling* sebaliknya. Anak leluasa belajar di rumah, orang tua hadir sebagai guru atau kepala sekolah dengan menghadirkan guru.

Namun, sebagian kalangan masyarakat masih meragukan sekolah nonformal ini lantaran anak tidak belajar di sekolah pada umumnya. Sebagian lain mempersepsikan bahwa sekolah rumah hanya diperuntukan bagi anak-anak yang lambat dalam menyerap pelajaran atau yang malas.

Pada hal secara legalitas, keberadaan sekolah rumah sebagai pendidikan nonformal sudah diakui dalam Undang-undang No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Selain itu, faktanya beberapa anak berprestasi justru lahir dari metode pendidikan alternatif yang fleksibel dalam proses belajar mengajar ini.

Ketua Umum Asosiasi Sekolah Rumah dan Pendidikan Alternatif (Asah Pena) Seto Mulyadi menuturkan, banyak anak-anak yang berhasil meraih prestasinya setelah pindah dari sekolah formal ke sekolah rumah.

"Contoh, ada banyak anak-anak dari *homeschooling* yang saya kelola berhasil masuk ke perguruan tinggi negeri, termasuk di [Fakultas] Kedokteran UI [Universitas Indonesia], UGM [Universitas Gadjah Mada], Undip [Universitas Diponegoro]. Ada juga yang berhasil menjadi pengusaha hingga atlet internasional," ujarnya.

Pria yang akrab disapa Kak Seto itu menjelaskan, ada tiga jenis sekolah rumah. *Pertama*, sekolah rumah tunggal yang menekankan pembelajaran mandiri dengan keluarga. *Kedua*, sekolah rumah majemuk di dalamnya terdapat dua hingga tiga keluarga berkumpul menjadi satu. *Ketiga*, sekolah rumah komunitas yang datang ke sekolah nonformal.

Adapun sekolah rumah yang dikelolanya berjenis komunitas untuk jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Kegiatan belajar mengajar dilakukan sebanyak tiga kali dalam sepekan. Durasinya, selama 3 jam dengan jumlah siswa maksimal 10 orang.

Untuk guru yang dilibatkan juga memiliki kompetensi yang setara dengan guru di sekolah formal.

Lebih lanjut, Kak Seto menuturkan, sekolah rumah tidak bisa serta merta dibandingkan dengan sekolah formal. Peralannya, keduanya hadir untuk mengakomodasi kebutuhan anak yang berbeda satu dengan lainnya.

"Anak yang *homeschooling* dipaksa untuk sekolah formal ya tidak bisa, demikian sebaliknya. Orang tua tidak bisa memaksakan anak-anaknya, bisa stres dan tidak bisa berkembang," tegasnya.

Mengenai bahan ajar *homeschooling*, Kak Seto mengatakan, anak-anak sekolah rumah bisa ikut mengakses buku-buku yang tersedia di perpustakaan daerah setempat, layaknya anak-anak sekolah formal.

"Kalau di sekolah rumah yang saya kelola disiapkan juga perpustakaan keliling yang datang ke titik belajar. Beberapa siswa kami ini ada yang anak-anak jalanan atau terpaksa ikut orang tuanya bekerja," ujarnya.

KETERPADUAN

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan struktur baru sesuai dengan Peraturan Presiden No. 82/2019 tentang Kemdikbud, berupaya meningkatkan kualitas pendidikan nonformal dengan mewujudkan



Ragam Metode Pembelajaran Homeschooling

Selain terbagi menjadi model terstruktur (*school-at-home*) dan tidak terstruktur (*unschooling*), *homeschooling* juga terbagi ke dalam lima metode pembelajaran, antara lain:

1. Klasik

Metode ini berbasis pada literatur yang menggunakan kurikulum terstruktur dan berdasar pada tiga tahap perkembangan anak yang disebut *trivium*. Penekanannya adalah kemampuan ekspresi *grammar*, *logic*, dan *rhetoric*. Secara sederhana hal itu diartikan sebagai tahapan pengetahuan, pengertian, dan kebijakan.

2. Charlotte Mason/The Living Book Approach

Metode ini memberikan konsep melatih anak untuk membaca "buku hidup" yaitu buku yang isinya tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi mampu bercerita, sehingga setelah anak membaca buku mampu menceritakan kembali dengan bahasanya sendiri.

3. Waldorf Approach

Metode ini bertumpu secara keseluruhan pada kepala, hati, dan tangan. Metode ini dianggap sebagai seni alih-alih sistem pedagogi yang digunakan untuk membangkitkan kemampuan dan menanamkan intelektual anak agar mampu mencari pengetahuan serta menikmati dalam proses belajar.

4. Montessori Approach

Metode ini menekankan anak untuk melakukan pengamatan dan mencatat yang ada di luar rumah secara mandiri. Orang tua hanya menyiapkan dan mengatur lingkungan sebagai pendukung proses belajar yang nyata dan alami. Proses interaksi anak dengan lingkungan baik secara fisik, mental, dan spiritual yang terjadi secara alami dan tidak dibatasi oleh umur menjadi inti dari metode ini.

5. The Eclectic Approach

Metode ini memberikan kesempatan pada keluarga untuk merancang program *homeschooling* sendiri dengan memilih dan menggabungkan yang sudah ada. Peranan orang tua dalam praktek *homeschooling* bertanggung jawab sebagai pengajar yaitu memberikan pembekalan ilmu pengetahuan dan keterampilan pada anak-anaknya, sedangkan sebagai pendidik adalah membentuk karakter, akhlak, budi pekerti, atau nilai-nilai keagamaan.

Sumber: Rumah Belajar Kemdikbud (<https://sumberbelajar.belajar.kemdikbud.go.id>)

BISNIS/RADITYO EKO



keterpaduan antara pendidikan formal dan nonformal.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud Harris Iskandar mengatakan, keterpaduan antara dua jalur pendidikan yang berbeda ini tidak serta merta akan mengubah jalur pendidikan nonformal menjadi formal. Keterpaduan tersebut mendorong adanya kolaborasi, termasuk penggunaan sumber daya pendidikan formal.

"Termasuk gedung, sarana prasarana, ruang kelas untuk pendidikan nonformal, jika memang diperlukan," imbuh Harris.

Praktisi pendidikan dari Teacher Trainer and School Consultant Weilin Han menilai, keterpaduan antara pendidikan formal dan nonformal sudah sepatutnya terwujud agar seluruh anak Indonesia bisa mendapatkan perhatian dan dukungan yang sama dari pemerintah.

Dia memberi contoh, anak-anak *homeschooling* membutuhkan buku materi pembelajaran dan buku pelajaran di sekolah. Namun, karena mereka statusnya mengenyam pendidikan nonformal, tentunya tidak punya hak untuk mengakses buku itu.

"Padahal, belum tentu setiap daerah punya perpustakaan daerah yang memadai," katanya.

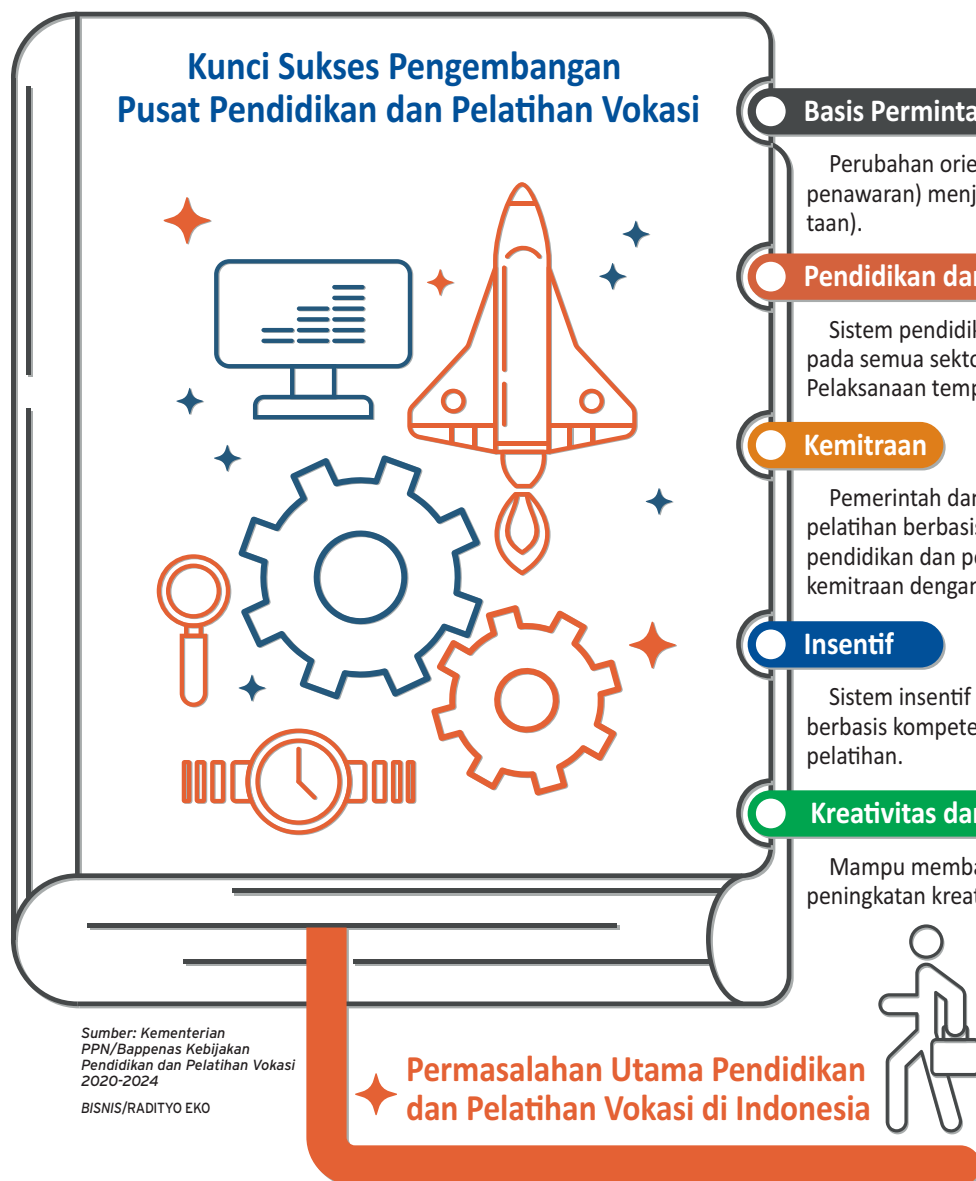
Menurut Weilin, penggunaan fasilitas bersama oleh anak-anak yang mengenyam pendidikan formal dan nonformal tidak sulit untuk diimplementasikan. Hanya, untuk teknis pelaksanaannya tidak bisa disamaratakan begitu saja di setiap sekolah.

Namun yang jelas, menurutnya, jangan sampai penggunaan fasilitas oleh anak-anak yang mengenyam pendidikan nonformal mengganggu anak-anak yang mengenyam pendidikan formal.

Pendidikan Vokasi Perlu Pembentukan

Selama ini, sistem pendidikan kejuruan atau vokasi dinilai sebagai solusi atas permasalahan pengangguran di Tanah Air. Perlu ada terobosan agar pendidikan vokasi mampu menciptakan lulusan kompeten.

REZHA HADYAN
redaksi@bisnis.com



Pengembangan pendidikan vokasi ini diharapkan dapat menciptakan tenaga kerja yang kompeten, sesuai dengan kebutuhan industri. Sayangnya, banyak lulusan yang belum memenuhi kebutuhan industri di Tanah Air.

Manajer Program Pengembangan Keterampilan Badan Perburuhan Internasional (International Labour Organization/ILO) Indonesia Tauvik Muhammad menilai, pelatihan dan pendidikan vokasi di Indonesia masih dibayangi persoalan ketidaksesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri.

"Perkembangan penggunaan teknologi baru di industri, jauh lebih cepat dibandingkan dengan pemutakhiran teknologi di dunia pelatihan atau pendidikan vokasi. Di samping itu jumlah dan kualitas instruktur yang ada," ujarnya.

Oleh sebab itu, sambungnya, dalam upaya pengembangan, perlu dibangun kemitraan antara industri dengan lembaga pelatihan dan pendidikan vokasi melalui sebuah forum. Di beberapa negara, forum itu dikenal dengan dewan keterampilan sektor atau *sector skills council*.

Selain itu, sambungnya, diperlukan juga layanan ketenagakerjaan publik yang bermitra dengan industri. "Layanan ini akan mempertemukan permintaan dan penawaran tenaga kerja termasuk mengidentifikasi keterampilan vokasi apa yang dibutuhkan oleh pasar kerja atau industri," ungkapnya.

Selanjutnya, yang tak kalah penting adalah mendorong industri untuk dapat terlibat aktif melalui forum keterampilan sektor. Keterlibatan mereka dibutuhkan dalam penyusunan standar kompeten-

si, kurikulum pelatihan dan pendidikan vokasi, dan memfasilitasi pemagangan.

Jika diperlukan, tak menutup kemungkinan disiapkan dana pengembangan pelatihan dan pendidikan vokasi guna menjamin keberlanjutan upaya tersebut.

Apalagi, pemerintah juga sudah memberikan insentif pajak melalui aturan baru *super tax deduction* sampai 200% bagi perusahaan yang terlibat dalam pelatihan dan pendidikan vokasi. Dengan demikian, perusahaan bisa berpartisipasi dalam pendidikan vokasi.

"Informasi terkait dengan insentif pajak. [Informasi] ini juga perlu disebarluaskan," tuturnya.

Saat ini, menurut Tauvik, modal yang perlu disiapkan untuk mengantisipasi perubahan kebutuhan kompetensi tenaga kerja di masa depan adalah kemampuan teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, kemampuan terkait dengan industri jasa dan kreatif.

JARAK JAUH

Soal belum meratanya pendidikan vokasi di Indonesia, Tauvik mengatakan, bisa disiasati dengan pembelajaran jarak jauh. Terlebih di tengah kondisi pandemi COVID-19, pembelajaran jarak jauh bukan hal yang mustahil. Terbukti kegiatan belajar mengajar bisa terselenggara secara jarak jauh.

"Jika dalam bentuk daring tentunya infrastruktur koneksi internet menjadi prasyarat. Tetapi pembelajaran jarak jauh [juga] bisa dalam bentuk luring, seperti lewat televisi," tuturnya.

Untuk mengimplementasikan pembelajaran model ini, Taufik mengatakan, perlu ada semacam rumah produksi untuk menyusun dan memproduksi materi ajar secara masif. Selain itu, dibutuhkan juga panduan pedagogik khusus bagi instruktur, kerangka penilaian, dan sertifikasi khusus agar implementasi bisa berjalan dengan baik.

"Beberapa jenis pelatihan dan pendidikan vokasi seperti pengelasan misalnya memerlukan tempat untuk implementasi dan pengujian keterampilan praktik yang juga harus disiapkan," tutupnya.

Sementara itu, Direktur Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Mahatmi Parwitasari Saronto mengatakan, integrasi pembelajaran jarak jauh dibutuhkan untuk mewujudkan pemerataan pendidikan dan pelatihan vokasi di Indonesia. Pertimbangan utamanya adalah kondisi geografis yang sangat luas dan beragam.

"Kita perlu belajar dari negara-negara lain dalam mengintegrasikan pembelajaran jarak jauh ke dalam sistem pelatihan dan pendidikan vokasi untuk mengatasi ketimpangan dalam mengakses program pengembangan keterampilan antara perkotaan dan perdesaan," ujarnya.

Menurut Mahatmi, Indonesia bisa belajar bagaimana proses pembelajaran jarak jauh yang selama ini diterapkan oleh Australia dan Filipina. Selain lebih fleksibel dan terjangkau, sambungnya, pembelajaran jarak jauh juga memungkinkan pendidikan dan pelatihan vokasi bisa diakses dengan mudah oleh seluruh kalangan, tak terkecuali penyandang disabilitas.

Namun, Mahatmi tak menampik bahwa implementasi pembelajaran jarak jauh masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain kapasitas guru atau instruktur, ketersediaan infrastruktur, dan rendahnya tingkat literasi digital masyarakat.

"Materi [juga] perlu disiapkan agar cukup satu materi tetapi bisa dengan mudah dipahami dan dipraktikkan secara langsung. Karena pembelajaran jarak jauh di Indonesia saat ini masih banyak yang memerlukan lebih dari satu materi dari sumber yang terpisah," tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani menilai metode pembelajaran jarak jauh untuk pendidikan dan pelatihan vokasi tidak menjadi persoalan bagi pelaku usaha asalkan didukung oleh lembaga yang kompeten dan kredibel.

"Mungkin ada hal-hal seperti teori yang disampaikan secara jarak jauh untuk kemudian praktiknya tetap dilakukan di lapangan dengan tenaga pengajar atau pelatihnya."



Bisnis/Rachman



Antara/Rony Muhanam



Antara/Iggoy El Filra

Belajar Tanpa Henti

Pandemi virus corona telah membuat ruang-ruang kelas sekolah yang biasanya ramai dengan aktivitas siswa-siswi, kini sunyi. Namun, hal itu tidak menghalangi mereka untuk belajar.

EUSEBIO CHRYSNAMURTI
redaksi@bisnis.com



Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Lingkungan sekolah menjadi penting dalam membangun karakter siswa serta membentuk kepribadian, kecerdasan dan kreativitas. Namun, merebaknya pandemi virus corona belakangan ini membuat aktivitas di lingkungan sekolah dalam beberapa minggu ini harus berhenti sejenak. Sekolah yang biasanya selalu menghadirkan keceriaan siswa-siswi sekarang tampak lenggang. Sejak dimulainya penutupan sekolah pada awal bulan Maret 2020, kegiatan belajar mengajar dilakukan secara jarak jauh dan diberlakukan belajar dari rumah. Pemerintah menginstruksikan seluruh sekolah untuk

melibatkan seluruh siswa, dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas. Langkah tersebut diambil untuk mencegah penyebaran virus corona (Covid-19) di lingkungan sekolah. Belum ada yang tahu sampai kapan keadaan seperti ini akan kembali pulih. Namun yang pasti, semangat para siswa-siswi untuk belajar tetap menyala. Meskipun terpaksa belajar di rumah, mereka tetap antusias mengikuti pelajaran seraya berharap situasi dapat kembali normal. **B**



Jibi/Ferri



Antara/Sailul Bahri



Bisnis/Eusebio Chrysnamurti



Antara/Irsan Mulyadi